

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN*  
DAN PROGRAM *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)**



**ALWINA PUTRI DWIGITA**

**NPM. 1451020012**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018**

**IMPLEMENTASI AKAD *QARDHUL HASAN* DAN PROGRAM *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**(Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)**

**Skripsi**

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, M. E. Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau akad *Qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Selanjutnya program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) adalah semua bentuk aktivitas untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi serta regulasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah KC Tanjung Karang? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi serta regulasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sebanyak 10 orang dan 3 lembaga yang mendapatkan program I-CSR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* dan dana yang digunakan bersumber dari dana yang diterima dari zakat, infaq, sedekah dan hasil pendapatan non halal bank seperti denda akibat keterlambatan pembayaran dan pendapatan dana dalam melakukan transfer pada bank koresponden yang konvensional. Sedangkan untuk mengimplementasikan program-program I-CSR pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang telah menyisihkan laba setelah pajak sebesar 2,5% yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan kepada pondok pesantren Al-Munawwirussholeh, pondok pesantren Riyadhus Sholihin, dan Lembaga Amil Daarut Tauhid serta masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah akad *Qardhul Hasan* diimplementasikan kepada pegawai kontrak BNI Syariah KC Tanjung Karang yang membutuhkan saja dan pihak bank masih belum mendistribusikannya kepada masyarakat luas. Selanjutnya untuk implementasi program I-CSR pihak bank memberikan bantuan yang bersifat konsumtif dan belum bersifat produktif atau belum kearah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Akad *Qardhul Hasan*, Program *Islamic Corporate Social Responsibility*, Kesejahteraan Sosial.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

PERSETUJUAN

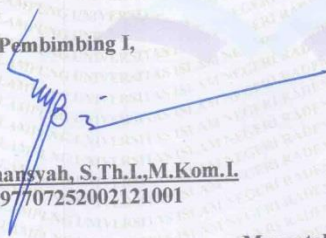
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DAN  
PROGRAM ISLAMIC CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi pada BNI Syariah  
Kantor Cabang Tanjung Karang)

Nama : Alwina Putri Dwigita  
NPM : 1451020012  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

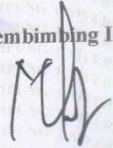
MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

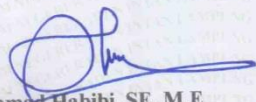
Pembimbing I,

  
Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I.  
NIP. 197707252002121001

Pembimbing II,

  
Muhammad Kurniawan, M.E.Sy  
NIP. 198605172015031005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

  
Ahmad Habibi, SE, M.E  
NIP. 197905142003121003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 (0721) 780887

**PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN DAN PROGRAM ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (STUDI PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG)**, Oleh: **Alwina Putri Dwigita, NPM: 1451020012, Jurusan: Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juni 2018.

**TIM MUNAQSAH**

**Ketua : H. Supaijo, M.H.**  
**Sekretaris : Dedi Satriawan, M.Pd.**  
**Penguji I : Syamsul Hilal, M.Ag.**  
**Penguji II : Budimansyah, M.Kom.I.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

**DEKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Dr. Moh Bahrudin, M.A.**  
**NIP. 195808241989031003**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”*

*(QS. Al-Ma'idah : 2)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), h. 106.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil Alaamiin*, seiring rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Hendarwin dan Ibunda Erna Yani.S yang selama ini selalu sabar menjaga dan merawatku sampai saat ini, memberikan semangat dan mencurahkan jiwa dan raganya hanya untuk segera melihat putrinya menyelesaikan perkuliahan, yang jasanya tidak mungkin dapat aku balas. Tiada kata-kata yang dapat terucap dari lisan putrimu ini atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki, keberkahan umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Abang ku dan Ayuk ku tercinta Archie Rizky Pratama dan Wida Ayu Rahmawati serta Adik ku tersayang Aldhi Trimaulana yang turut memberikan doa, waktu, selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga terselesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamater ku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alwina Putri Dwigita. Lahir di Sumatera Selatan tepatnya di Lahat pada tanggal 29 Oktober 1995. Anak ke dua dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Hendarwin dan Ibu Erna Yani.S. Jenjang pendidikan penulis ialah sebagai berikut :

1. Pendidikan pertama dimulai dari TK Dharma Wanita Sungai Guntung, RIAU Pada Tahun 2001-2002;
2. Kemudian MI Negeri 1 Tembilahan, RIAU 2002-2008;
3. Kemudian SMP Negeri 7 Kotabumi, Lampung Utara, 2008-2012;
4. Kemudian SMA Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2011-2014;
5. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Seperti berperan sebagai Sekretaris Divisi Kesekretariatan UKM-F RISEF (Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Raden Intan Sharia Ekonimic Forum) tahun kepengurusan 2016-2017. Selanjutnya sebagai Ketua Divisi HUMAS GenBI (Generasi Baru Indonesia yaitu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia) dan sebagai anggota dari Komunitas Sahabat Sedekah Lampung.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohiim*

*Alhamdulillahillobil alaamiin*, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpah taufik serta hidayah-NYA berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan-NYA.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.). Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci saya ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Ahmad Habibi S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasihat

4. Bapak Budimansyah, S.Th.I.,M.Kom.I. Selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Kurniawan, M. E. Sy Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, usulan perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
6. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi, data dan lain-lain.
8. Sahabat seperjuangan Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2014 khususnya kelas E terutama Ila Pangestu, Ervia Nina Sari, Rizki Armando, Agus Fajar, Happy Irawan, Rendi Abdi Kusuma, Yusuf Andi Irawan, yang telah bersama-sama mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini.
9. Kepada Branch Manajer BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Bapak Ichsan Mayudi yang telah bersedia memberi izin penelitian dan pengumpulan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Ibu Fitri Agussafitri Selaku Kepala Bagian I-CSR BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, Kak Dedi Kurniawan, Bang Dani, beserta seluruh staff pegawai BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang

telah bersedia membantu memberikan informasi dalam rangka terselesaikannya skripsi ini.

11. Kepada Bapak Kiswantoro, Bapak Hermansyah, Ibu Atin dan seluruh Responden yang telah rela meluangkan waktunya.

12. Sahabat-sahabat terbaikku Desi Kurnia Mega, Firstella Apnizar, Indah Suwartini, Ismi Imani, Fitri Wahyuni, Nausa Rachtri Cancera, Auliya Larasati, Erma Oktaria, Desi Ayu, Intan, Wulan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama ini sudah menjadi seperti keluarga dalam suka maupun duka, yang telah memberikan semangat, motivasi serta inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

13. Kepada Pembina, seluruh pengurus, demisioner dan Kader UKM-F RISEF, Teman-teman GenBI dan Ibu Dyah Etika WS, Livia, serta seluruh keluarga besar Sahabat Sedekah Lampung yang selalu memberikan keceriaan dan pengalaman akan pentingnya peduli terhadap sesama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan dalam menulis skripsi. Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya,

**Bandar Lampung, 25 Mei 2018**  
**Penulis**

**Alwina Putri Dwigita**  
**NPM.1451020012**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi



### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Tinjauan Pustaka .....	19

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>Qardhul Hasan</i> .....	23
B. <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> .....	44
C. Kesejahteraan Sosial. ....	72



### BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT BNI Syariah KC Tanjung Karang .....	81
B. Implementasi dan Regulasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> .....	93
C. Implementasi Program <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> .....	95

### BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Akad <i>Qardhul Hasan</i> dan Program <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> .....	99
B. Dampak Akad <i>Qardhul Hasan</i> dan Program <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kesejahteraan Sosial .....	117
C. Solusi dalam Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> dan Program <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kesejahteraan Sosial.....	124

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	129

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Skripsi ini berjudul **Implementasi Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>2</sup>
2. Akad *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h. 352.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

3. *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab kepada masyarakat yang tidak hanya melihat dari sisi ekonomi yang bersifat materi saja atau adanya peraturan Undang-Undang akan tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai rohani dan atas rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah SWT.<sup>4</sup>
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility*. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 108.

<sup>4</sup> Adiwarman Azwar Karim, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 49-50.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

## 1. Secara Objektif

Akad *Qardhul Hasan* merupakan suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai rohani dan atas rasa tanggung jawab terhadap perintah Allah SWT. Dalam hal penyaluran dana yang diberikan oleh bank, penulis ingin meneliti mengenai implementasi dana kebajikan dan program tanggung jawab sosial yang telah diberikan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

## 2. Secara Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan.
- c. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* yang terdapat pada BNI Syariah KC Tanjung Karang. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam persoalan-persoalan terkait implementasi akad *Qardhul Hasan* dan



program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan umat-Nya untuk berusaha agar mendapatkan rizki dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga mendorong umat-Nya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, dan bidang usaha lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu yang bermanfaat bagi umat manusia, atau yang dapat memperindah kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Sebelum mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ada problematika ekonomi umat yang terletak pada masalah ketergantungan ekonomi. Masalah ketergantungan ekonomi dapat dilihat pada kesulitan yang dialami individu-individu, kelompok dan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal. Masalah ini sering dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Adapun, kemiskinan itu sendiri, mempunyai pengertian yang beragam. Pada dasarnya, kemiskinan tidak saja berupa kemiskinan ekonomi (yang menunjuk kepada anggota atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan hidup tertentu hingga tidak mampu memperbaiki diri untk mencapai standar kehidupan yang layak), tetapi juga kemiskinan emosional (yang mempunyai pengertian khusus). Kemiskinan emosional ini ditunjukkan bagi mereka yang mengalami keadaan hidup tertentu, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sosial-

psikologik. Kemiskinan emosional ini, disebabkan oleh relasi-relasi yang tidak harmonis dalam lingkungan sosial (keluarga, tetangga, sekolah, dan tempat kerja).<sup>6</sup>

Pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan social, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah pusat maupun daerah. Semua program yang diluncurkan pemerintah tersebut merupakan suatu usaha penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan pembangunan diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan ini, salah satu sektor yang berperan penting dan memiliki posisi strategis dalam rangka mewujudkan tujuan nasional adalah sektor perbankan. Industri perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian yang dapat dirasakan saat ini, yang hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bank atau lembaga keuangan.

---

<sup>6</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa* (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 113-114.

Lembaga intermediasi keuangan yang berupa bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan lembaga keuangan nonbank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Pegadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, perusahaan Asuransi, Perusahaan Modal Ventura dan Dana Pensiun.<sup>7</sup>

Dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau biasa dikenal dengan nama *Qardhul hasan* merupakan produk yang paling khas dan secara syar'i sangat penting. Akad *Qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Qardh*.<sup>8</sup>

*Qardhul Hasan* sebenarnya merupakan *unique product* dari bank Islam. Karena produk ini tidak mengharuskan adanya pemberian profit atau keuntungan dari nasabah dan juga nasabah bagi produk ini adalah orang yang secara ekonomi masuk dalam kelas bawah. Bahkan, dalam kondisi ekstrim, jika pun nasabah tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya, pihak bank tidak akan menarik kembali.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Cet III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 18

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 85.

Selain akad *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh perbankan syariah ada juga suatu program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) atau yang disebut dengan pertanggungjawaban sosial secara Islam. *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana ia berasal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.

Lembaga-lembaga keuangan lainnya juga telah melakukan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi bagian dari kegiatan perusahaan yang tidak lagi bersifat sukarela, melainkan bagian dari kewajiban beberapa perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT terdapat 2 kriteria sektor kegiatan yang mewajibkan Perusahaan untuk melaksanakan CSR tersebut, yaitu : 1. Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 2. Perseroan yang menjalankan kegiatan

---

<sup>9</sup> Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J, “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 5, No. 1, Maret 2013, h. 4.



usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Dengan demikian setiap perusahaan harus melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 Tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) untuk menjalankan CSR.<sup>10</sup>

Ditinjau dari perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah ada dalam ajaran Islam. Manusia selaku *khalifah* dimuka bumi memiliki kewajiban untuk memakmurkannya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kesempurnaan iman seseorang tidak akan tercapai jika hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah SWT semata (*Habluminallah*) tetapi juga harus diikuti dengan hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama

---

<sup>10</sup> Muhammad Imam Purwadi, "Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21, No. 1, (Januari 2014), h. 30-31.

<sup>11</sup> Hafiez Sofyan, dkk, "Islamic Social Reporting Index sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)" *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 4, No. 1 (Maret 2012), h. 37-38.

manusia (*Habluminannas*). Seperti juga yang disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَشَاءُوا إِلَّا خَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَخَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا  
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ  
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (QS. Ali-Imran : 112)<sup>12</sup>

Mengingat dasar filosofi tersebut bersifat religious, maka dalam pelaporan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pun harus memperhatikan faktor halal-haram, riba, *gharar*, *maysir*, dalam kegiatan operasional usahanya, pemerataan kesejahteraan social hingga keberkahan usaha.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial akan memberikan dampak positif. Dampak positif dari program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) tidak hanya bagi operasional perusahaan akan tetapi juga terhadap kelangsungan eksistensi perusahaan untuk waktu yang panjang. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjkan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: Kalim, 2011), h. 65.

pembelaannya. Karyawan pun akan berdiri di belakang perusahaan membela tempat institusi mereka bekerja. Untuk itu program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) harus diberikan tepat pada sasaran yang dituju sehingga manfaatnya akan jelas dirasakan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”** penelitian ini dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah KC Tanjung Karang?
2. Bagaimanakah implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah KC Tanjung Karang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi ilmu perbankan syariah khususnya pada akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Serta sebagai sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha dan masyarakat mengenai pentingnya akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.



## G. Metode Penelitian

Metode merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Jadi metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah.<sup>14</sup> Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan tentang permasalahan mengenai implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* serta program *Islamic Corporate Social Responsibility*

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 7.

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun data tersebut diperoleh dari BNI Syariah KC Tanjung Karang.

Sedangkan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian dengan pihak-pihak yang terkait di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang pada bagian pembiayaan akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility*. Selanjutnya data yang bersumber dari masyarakat yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* dan masyarakat yang mendapatkan program *Islamic Corporate Social Responsibility*.
- b. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 9.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dibagian pembiayaan dan masyarakat yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* dan masyarakat yang mendapatkan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup> Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari referensi lain seperti dokumen, jurnal dan buku-buku seperti : buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Karangan Muhammad, buku *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Karangan DR. Ir. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., MBA., M.A.E.P. dan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D. buku Pengantar Kesejahteraan Sosial karangan Rohiman Notowidagdo, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

<sup>17</sup> *Ibid.*

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 62, Kel. Enggal, Bandar Lampung, Telp 0721-242517.

### 4. Populasi

Populasi merupakan salah satu hal yang essential dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitiannya.<sup>18</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sebanyak 10 orang dan 3 lembaga yang mendapatkan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yaitu pondok pesantren Al-Munawwirusholeh di Jalan Moch Roem Gg. Renville Sumur Putri Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, pondok pesantren penghapal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin di Jalan Dr. Harun II Komplek vila mas kelurahan kota baru, dan Lembaga Amil Daarut Tauhid di Jalan Terusan Way Semangka No. 42 Pahoman, Bandar Lampung.

---

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 145.

## 5. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.<sup>20</sup> Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13, yaitu nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sebanyak 10 orang dan 3 lembaga yang mendapatkan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR).

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan, sehingga peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan<sup>21</sup> tentang implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di BNI Syariah KC Tanjung Karang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 149.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Op.Cit.* h. 85.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 204



b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>22</sup>

Wawancara dilakukan dengan karyawan BNI Syariah KC Tanjung Karang yaitu Ibu Fitria Agussafitri pada bagian BOH (*Back Office Head*), Bapak Dedi Kurniawan pada bagian OA (*Operational Assistant*), dan Bapak Rudi Winanda selaku SME (*Small Medium Enterprise*) *Financing Head*. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* di BNI Syariah KC Tanjung Karang. Selanjutnya juga, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak penerima dana seperti nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* sebanyak 10 orang dan 3 lembaga yang mendapatkan program *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Op. Cit.* h. 372.

sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>24</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara, observasi maupun studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai cara-cara dan tahapan yang dilakukan BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* serta program *Islamic Corporate Social Responsibility*. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>25</sup> Dengan mereduksi data maka akan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 391.

<sup>24</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), h. 34.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Op. Cit*, h. 431.

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>26</sup> Dengan langkah ini akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.<sup>27</sup>

## H. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu tentang implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Agus Triyanta, MA.,MH,PhD. (Ketua) dan Imam Purwadi (Anggota) Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Optimalisasi Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 434.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 438.

Kasus Bank Muamalat Indonesia)”.<sup>28</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta menggunakan pendekatan historis yaitu menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteliti. Kesimpulannya adalah Pembiayaan melalui prinsip *al-qardhul hasan* merupakan kewajiban sosial Perbankan Syariah yang bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah. Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip *al-qardhul hasan* ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. *Qardhul hasan* dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alma Deleni Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, yang melakukan penelitian tentang “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) UMKM Batik Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif yang

---

<sup>28</sup> Agus Triyanta, “Optimalisasi Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”. (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2013) h. 98.

<sup>29</sup> Alma Deleni, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) UMKM Batik Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. (Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017), h. 104.

mana analisis data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa secara umum CSR yang dilakukan oleh pelaku UMKM Batik meningkatkan kesejahteraan karyawan UMKM Batik. Sebanyak 50 karyawan dengan persentase 83% karyawan sudah mengalami peningkatan kesejahteraan tinggi. Peningkatan kesejahteraan tertinggi dirasakan oleh karyawan yang terbantunya biaya sekolah anak, biaya hidup sehari-hari, layak nya tempat tinggal, optimis terhadap masa depan, lingkungan sehat dan memiliki alat transportasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Fatimah Anam Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang melakukan penelitian tentang “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. Yang mana *maqashid syariah* terdiri dari lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. CSR sendiri selain sudah memenuhi hukum Islam, tanggung jawab sosial ini juga memenuhi prinsip-prinsip Islam yang ada 4, yaitu *Al-Adl*, *Al-Ihsan*, manfaat dan amanah. Contoh dari *Al-Adl* yaitu BNI Syariah membangun masjid, *Al-Ihsan* yaitu kewajiban perusahaan untuk masyarakat setempat,

---

<sup>30</sup> Ainun Fatimah Anam, “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”. (Skripsi Program S1 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 70.



memberikan manfaat kepada karyawan, dan amanah yaitu perusahaan dalam menjalankan penyaluran dana CSR, harus bertanggung jawab dari awal hingga akhir.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, beberapa karya pembahasan masalah akad *Qardhul Hasan* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di atas sangat penting dijadikan pendukung dalam skripsi ini sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pembahasan dalam penelitian sebelumnya, satu peneliti hanya membahas satu masalah mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* dan satu peneliti lainnya membahas tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membahas dua permasalahan yaitu mengenai implementasi dan regulasi akad *Qardhul Hasan* serta implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. AKAD QARDHUL HASAN

##### 1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Menurut bahasa Akad mempunyai beberapa arti, antara lain :<sup>31</sup>

- Mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga terhubung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda,
- Sambungan (*'aqdatun*) atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya,
- Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (QS Ali Imran: 76)<sup>32</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Atinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah:1)<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 19-20.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), h. 59.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 106.

Istilah '*ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>34</sup>

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang laib disebut perikatan ('*aqad*).<sup>35</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa setiap '*aqdu* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu :

- a. Perjanjian ('*ahdu*),
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c. Perikatan ('*aqdu*)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak atau berkumpulnya serah terima di antara

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 45

<sup>35</sup> *Ibid.*

dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Contoh ijab adalah pernyataan seorang penjual, "Saya telah menjual barang ini kepadamu." atau "Saya serahkan barang ini kepadamu." Contoh qobul, "Saya beli barangmu." atau "Saya terima barangmu".<sup>37</sup> Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 46

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43-45.

## 2. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai' yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy syai'a bil miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>38</sup> Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>39</sup>

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>40</sup>

Menurut Hukum Syara', para ahli *fiqh* mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Menurut Madzhab Hanafiyah, mengatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati

---

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 333.

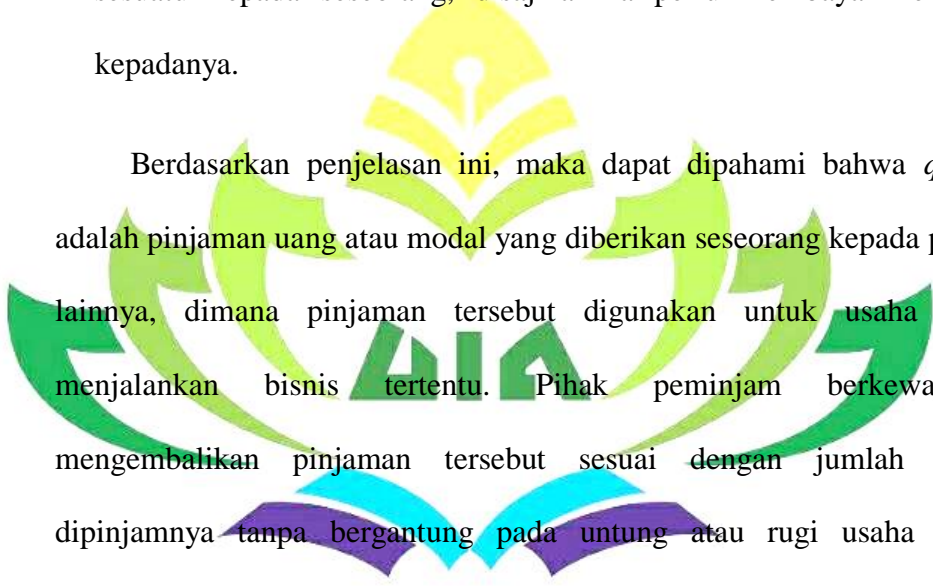
<sup>39</sup> *Ibid.* h. 334.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 169, mengutip Wahbah al-Zuhaili. *Al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2004), V/3786.



2. Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal
3. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya
4. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.



Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Kata *hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih

kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.<sup>42</sup>

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dan si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

### 3. Pengertian Akad *Qardhul Hasan*

Akad *Qardhul Hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>43</sup> Memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya menghutang Rp. 100.000, akan di bayar Rp. 100.000 pula.<sup>44</sup>

Akad *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa laba (*zero-return*) atau pinjaman kebajikan merupakan suatu pembiayaan yang bersifat sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pembiayaan

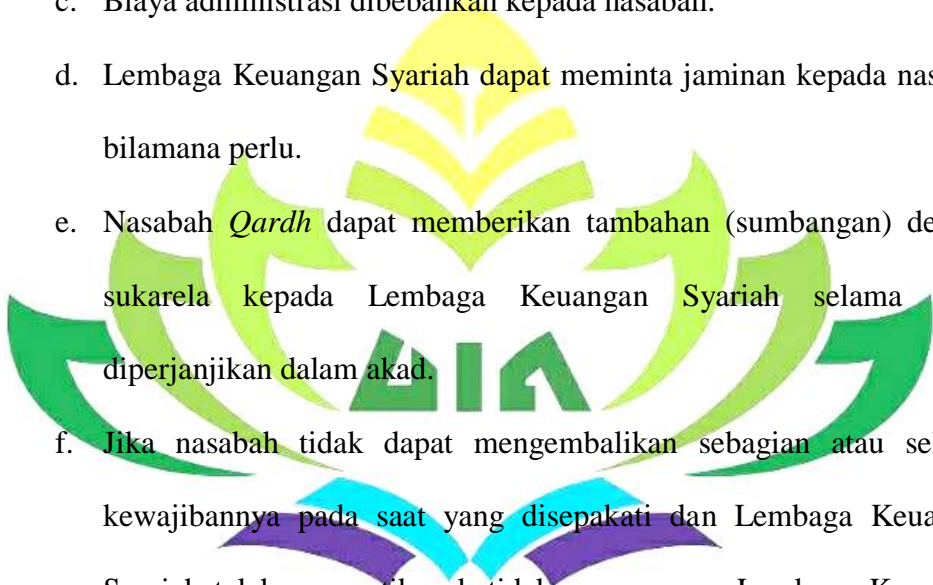
---

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343.

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 106.

<sup>44</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 213.

*Qardhul Hasan* merupakan bentuk implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* adalah :<sup>45</sup>

- 
- a. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
  - b. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
  - d. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu.
  - e. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
  - g. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan dan pihak *muqtaridh* tersebut wajib mengembalikan pokok yang diterima pada

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Op. Cit.* h. 107.

waktu yang telah disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *Qardhul Hasan*.

Menurut Andri Soemitra, akad *Qardh* adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dengan fitur dan mekanisme sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
- c. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biasa administrasi dalam batas kewajaran.
- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.

---

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2009), h. 84-85.

- e. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Produk bank dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dalam operasionalnya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qardhul hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk menembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.<sup>47</sup>

Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi ketentuan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri. Disamping ketentuan yang bersifat administrative yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

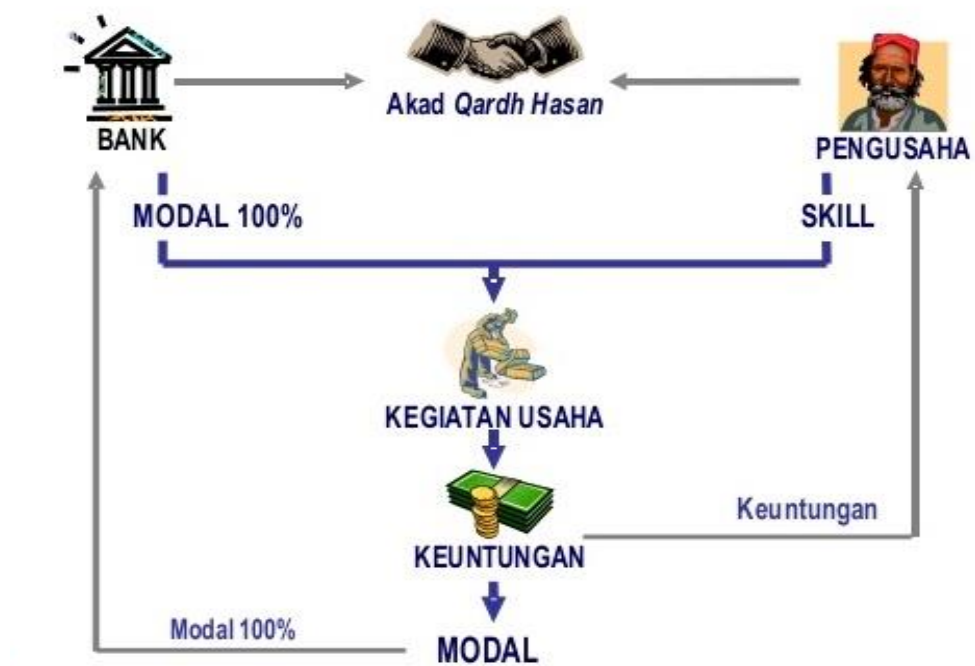
Adapun prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ditunjukkan dalam skema berikut :

---

<sup>47</sup> Muhammad Imam Purwadi, “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*”. *Jurnal Hukum IUS QUI IUSTUM*, Vol. 21 No. 1 (Januari 2014), h. 26.



**Gambar 1.1 : Skema Pinjaman Akad *Qardhul Hasan***



*Sumber : (Ascarya, 2013)*

Penjelasan skema pinjaman *qardhul hasan* yaitu pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* kemudian bank memberikan modal 100% kepada nasabah atau pengusaha yang memiliki skill dan sebagai pengelola dana. Selanjutnya, nasabah melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah dan bank mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.

#### 4. Dasar Hukum Akad *Qardhul Hasan*

##### a. Landasan Al-Qur'an

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada Al-Qur'an, sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ



Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia ”.  
(QS. Al-Hadid : 11)<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang kalian infakkan niscaya Allah akan mengganti sesuatu itu untuk mu sejak di dunia. Lalu di akhirat, Allah pun akan memberi balasan pahala atasmu (Ibnu Katsir).<sup>49</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dibawah ini :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 538.

<sup>49</sup> Syaamil Quran, *Hijaz The Practice 604 Panduan Amal Praktis Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan As Sunnah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2013), h. 1083.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 106.

Allah SWT mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridho Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Allah SWT melarang mereka tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan seperti memberi pinjaman kepada yang membutuhkan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong dimana pihak peminjam hanya dituntut untuk mengembalikan pokok pinjaman, tanpa dikenakan tambahan maupun margin keuntungan, terkecuali peminjam dengan sukarela melebihi pembayarannya.

#### b. Landasan Al-Hadits

Landasan *Qardhul Hasan* dalam Hadits Rasulullah, diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

---

<sup>51</sup> Syaamil Quran, *Op. Cit*, h. 209.

*Ibnu Mas'ud ra berkata bahwa Rasulullah bersabda “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surge tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya. Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena seseorang bisa meminta sedekah pada saat dia tidak memerlukannya tetapi meminjam hanya meminjam karena memang benar-benar butuh”.*<sup>52</sup> (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

Hadist Rasulullah tersebut menjelaskan bahwa pemberian pinjaman dengan cara *Al-Qardh* lebih berkenan bagi Allah dari pada memberi sedekah. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunah Nabi SAW dan ijma' ulama.<sup>53</sup>

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>54</sup>

d. Regulasi

Pelaksanaan pembiayaan produk *Qardhul Hasan* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>52</sup> HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi.

<sup>53</sup> Heru Sulistyio, Abdul Hakim, “Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui *Qardhul Hasan*”. *Jurnal Riptek*, Vol. 7 No. 1 (2013), h. 39-46.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 132-133.

dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.<sup>55</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Akad *Qardhul Hasan*

Rukun dari akan *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :<sup>56</sup>

- a. Pelaku akad, *muqtaridh* (peminjam) pihak yang membutuhkan dana.
- b. *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- c. *Muqtaradh/Ma'qud 'Alaih* atau Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
- d. Tujuan, yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-).
- e. *Shighah* yaitu *ijab* dan *qabul* (ucapan serah terima).

Sedangkan syarat dari akad *qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Orang yang melakukan akad (*muqtaridh* dan *muqridh*) harus baligh dan berakal. Akad *qardh* ini menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.
- b. *Qardh* (objek/dana yang dipinjamkan) harus berupa *maal mutaqqwin* (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal).

---

<sup>55</sup> Muhammad Imam Purwadi, *Op. Cit.* h. 57-58.

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 48.

<sup>57</sup> *Ibid.*



- c. *Shighah* yaitu ijab qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *qard* atau sepadan dengannya.

Dalam rukun dan syarat akad *qardhul hasan* ini menunjukkan bahwa peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi dibolehkan memberi bonus sesuai dengan keridaannya. Peminjam *qardhul hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*, kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktivitas mereka, dan kepada pegawai *outsourcing* disuatu lembaga keuangan. Pengembalian dilakukan selama suatu periode yang disepakati kedua pihak. Bank boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pinjaman. Jadi, kelebihan itu semata-mata untuk biaya pelayanan. Pembiayaan *qardhul hasan* bisa juga menjadi jalan untuk mempererat dan memfasilitasi hubungan bisnis. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan, untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.

Terkait dengan syarat *qardh* tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ada syarat-syarat subyek hukum didalam pelaksanaannya yakni, akad tersebut tidak boleh atau tidak dapat dilakukan oleh: orang gila, orang bodoh, anak kecil karena belum cukup umur dalam bertindak, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa

atau dalam keadaan terpaksa. Orang-orang tersebut yang merupakan orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya guna melakukan akad *tabarru'*. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya suatu wanprestasi oleh para pihak yang menjalankan suatu perjanjian, agar dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dalam melakukan prestasi. Sifat *qardh* ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori. Pertama, akad *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Kedua, akad *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.<sup>58</sup>

## 6. Tujuan Akad *Qardhul Hasan*

Pada dasarnya pinjaman *qardhul hasan* bertujuan atau diperuntukkan untuk mereka atau kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat *urgent* (darurat), diperuntukkan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>59</sup>

Tujuan akad *qardhul hasan* adalah :<sup>60</sup>

### a. Bagi Bank

---

<sup>58</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*". *Jurnal Yuridika*, Vol 28 No. 3 (September-Desember 2013), h. 413.

<sup>59</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010), h. 675.

<sup>60</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 55.

- 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank.
- 2) Peluang bank untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*.

b. Bagi Nasabah

- 1) Sumber pinjaman yang bersifat non-komersial
- 2) Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

Tujuan akad *qardhul hasan* sesuai dengan tujuan sistem perbankan Islam yang ingin membawa masyarakat paling tidak pada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Prinsip *al-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat.<sup>61</sup>

Keberadaan produk *Qardhul hasan* adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah). Ulama sangat menyadari bahwa pensyari'atan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah salah satu terobosan besar yang ditawarkan islam dalam sistem interaksi sosial-ekonomi sepanjang sejarah umat manusia sebagai solusi untuk usaha

---

<sup>61</sup> Dedi Riswandi, "Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2015), h. 246.

mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan dan yang terpenting adalah sebagai investasi modal bagi para mustahik dalam mengatasi berabagai kesulitan hidup.<sup>62</sup>

Dari tujuan diatas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan*, meski bukan sebuah produk komersial namun sangat penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena *Qardhul Hasan* adalah salah satu ciri perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk menolong nasabah dalam keadaan mendesak dan dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Serta dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat.

## **7. Manfaat Akad *Qardhul Hasan***

Didalam melakukan muamalah sudah pasti mendatangkan suatu manfaat. Sebagaimana melakukan transaksi *Qardhul Hasan* juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Manfaat *Qardhul Hasan* antara lain adalah :<sup>63</sup>

- a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 213.

- c. Dapat mengalihkan utang dengan rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah

Melalui fasilitas *Qardhul Hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan taraf hidupnya meningkat dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, peminjam kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil berarti meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan. Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui *Qardhul Hasan* antara lain adalah :<sup>64</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Dana infak dan shadaqah sebagai dana sosial akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya
- c. *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial
- d. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui akad *Qardhul Hasan* adalah transaksi *qardh* yang bersifat mendidik, dimana peminjam

---

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 134.



(*muqtaridh*) wajib mengembalikan pinjaman, sehingga dana tersebut terus mengalir dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri. Manfaat selanjutnya yang diberikan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* yaitu dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman dengan akad *tabarru'* (tolong-menolong) tanpa ada kelebihan imbalan dalam pelunasan.

#### 8. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan penerimaan imbalan dari peminjam diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.<sup>65</sup> Sumber dana *Qardhul Hasan* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, dan pendapatan non halal.<sup>66</sup> Sedangkan sumber dana *Qardhul Hasan* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 meliputi bagian modal Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>67</sup>

*Qardhul Hasan* tidak memberi keuntungan finansial, oleh karena itu pendanaan *Qardhul Hasan* dapat diambil menurut kategori berikut :

---

<sup>65</sup> PSAK No. 59

<sup>66</sup> PSAK No. 109

<sup>67</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

- a. *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Qardhul Hasan* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *Qardhul hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam dan membantu dhu'afa.<sup>68</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* berasal dari modal bank, zakat, infaq, sedekah dari nasabah serta pendapatan yang diragukan seperti denda akibat keterlambatan pembayaran, jasa nostro di bank koresponden yang

---

<sup>68</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* h. 133.

konvensional, pencairan dana deposito berjangka sebelum jatuh tempo yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah untuk membutuhkan dana dalam melakukan suatu usaha.

## **B. ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

### **1. Pengertian *Islamic Corporate Social Responsibility***

Setiap perusahaan di seluruh dunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang *Good Bussiness*. Salah satu kegiatannya adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). CSR adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat luas dan lingkungan. Usaha sosial perusahaan telah dikonsepskan lebih luas sebagai tugas manajerial untuk mengambil tindakan melindungi dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam bersaing.

*Corporate Sosial Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dengan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan

dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>69</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>70</sup>

Adapun Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>71</sup>

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.81.

<sup>70</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

<sup>71</sup> Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3).

<sup>72</sup> Darmawati, "Corporate Sosial Responsibility dalam Perspektif Islam". *Jurnal MAZAHIB*, Vol. XIII No. 2 (Desember 2014), h. 130.

Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan sekitar perusahaan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dilihat dari kacamata etika bisnis Islam, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam disebut dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) merupakan pertanggung jawaban dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *ihsan* (*benevolence*), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain, tanpa mengharapkan balas jasa dari perbuatan itu.<sup>74</sup>

*Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) berasal dari prinsip inti dalam Al-Qur'an. Tiga besar Prinsip dasar untuk melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR)

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 160



adalah khalayak manusia di bumi, pertanggung jawaban kepada Ilahi dan kewajiban pada umat manusia untuk memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan.<sup>75</sup>

Konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelesatarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas utama, yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, definisi *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dipahami sebagai semua bentuk aktivitas untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat dan alam sekitar.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Sayd Farook, "On Corporate Social Responsibility Of Islamic Financial Institutions". *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 15 No. 1 (July 2007), h. 33.

<sup>76</sup> Adiwarman Azwar Karim, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), h. 52.

<sup>77</sup> *Ibid.* h. 53.

Dalam sistem ekonomi Islam, *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) lebih bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi umat manusia dalam kehidupan. Bagi seorang muslim ia harus menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh itu hanya merupakan titipan sementara yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya, apakah itu jabatan, materi, anak dan lainnya dikelola sebaik-baiknya dan memberikan manfaat kepada banyak makhluk lainnya.

Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفِيعَةٍ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah (2) : 254)<sup>78</sup>

Dimana dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, yang berbunyi :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan Lah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 42.

Ayat-ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Allah SWT telah memerintahkan seluruh hamba-hamba-Nya agar beriman kepada-Nya, beriman kepada RasulNya dan *risalah* yang dibawanya. Allah SWT juga memerintahkan agar para hambaNya membelanjakan harta yang diberikan Allah SWT pada mereka dan juga menjadikan mereka sebagai khalifah dalam menggunakan harta itu. Allah SWT mendorong mereka untuk membelanjakan harta tersebut di jalanNya.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang mengacu pada hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah aturan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW dan berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

*Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembagian kekayaan berdasarkan kepada cara hidup dan hubungan kemanusiaan yang terjalin antar sesama umat manusia.

## 2. Sejarah *Islamic Corporate Social Responsibility*

---

<sup>79</sup> *Ibid.* h. 538.

<sup>80</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 139-140.

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan sesuatu yang asing, karena hal ini sudah ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu. Dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai tanggung jawab social sangat sering disebutkan. AL-Qur'an selalu mengaitkan antara kejayaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis, seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa' : 35)<sup>81</sup>

Demikian juga terhadap alam sekitar, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau bukan bisnis untuk selalu memastikan kelestarian alam. Sesuai dalam QS. Al-Baqarah (2) : 205, yaitu :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya : “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah : 205)<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 285.

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 32.

Pada aspek kebajikan, Islam sangat menganjurkan membantu orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui *shadaqah*<sup>83</sup> dan pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*).<sup>84</sup>

Dari beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama wujud dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab social dan menciptakan keadilan dalam masyarakat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Sehingga segala amalan Rasulullah SAW dalam aplikasi konsep tanggung jawab social dan keadilan dalam masyarakat menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Seperti tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh masyarakat Madinah (Anshar) terhadap masyarakat Mekkah (Muhajirin) yang melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Masyarakat Madinah membantu meringankan kesusahan masyarakat Mekah dengan memberikan apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Madinah. Hal ini diceritakan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud :

---

<sup>83</sup> Dalam Islam, kata *shadaqah* mempunyai dua makna. Pertama *shadaqah* yang bermakna derma wajib yaitu zakat dan kedua, derma sukarela (sedekah) seperti sumbangan kebajikan.

<sup>84</sup> *Qardhul Hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Instrument ini hanya dikenal dalam Islam.



وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا  
تَجِدُونَ فِي صُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  
بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Al-Hasyr : 9)<sup>85</sup>

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah wajib dijadikan pedoman bagi kehidupan kaum muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi baik bisnis maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukanlah suatu yang dapat dipisahkan dari konsep Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>86</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di dunia menjadi satu fenomena yang sangat mengejutkan dalam dua dekade terakhir ini. Di samping Iran, Pakistan, dan Sudan yang telah menjadikan seluruh perbankannya menjadi bank syariah, di tempat lain seperti Asia dan Eropa, bank syariah tumbuh begitu cepat. Setidak-tidaknya pada 1997 jumlah bank syariah di dunia sebanyak 176, pada 2004 menjadi 267, dan pada 2005 telah mencapai 270 perbankan syariah bertebaran di 75

<sup>85</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 546.

<sup>86</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit.* h. 11.

negara. Dengan asset lebih dari US\$ 300 juta, dana deposit berjangka US\$ 200 juta, dan saham sebesar US\$ 60 juta.<sup>87</sup>

Lembaga Keuangan Syariah pertama sekali lahir dalam bentuk bank tabungan perdesaaan di Mit Ghamr di Mesir (1963) yang didirikan oleh Ahmad al-Najjar. Apa yang dilakukan Ahmad al-Najjar menjadi cikal bakal berdirinya bank Islam di dunia. Dialah yang paling berhak mendapatkan pengakuan atas sebagian besar upaya perintisan LKS modern. Pada tahun 1980-an, bank Islam kemudian muncul di Negara-negara lain, seperti Kuwait, Jordan, Bahrain, Qatar, Malaysia, dan Bangladesh. Negara-negara barat yang masyarakat muslim merupakan minoritas turut mendirikan bank Islam, seperti Switzerland, Denmark, Luksemburg dan Inggris. *The Islamic Bank International of Denmark* tercatat sebagai bank Islam pertama yang beroperasi di Eropa yakni pada 1983 di Denmark. Bahkan bank-bank terkemuka di Negara-negara barat seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, Jardine Fleming dan HSBC telah membuka “*Islamic Banking Windows*” untuk memberikan layanan sesuai dengan syariat Islam.

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sangat pesat ini menjadi sebuah bukti bahwa konsep ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi Islam adalah sebuah konsep yang masuk akal untuk diimplementasikan. Ekonomi Islam layak menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi konvensional yang telah menyebabkan krisis

---

<sup>87</sup> *Ibid.* h. 12.

ekonomi global di beberapa Negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada 1997.

Beroperasinya Lembaga Keuangan Syariah di tingkat internasional ini menimbulkan minat yang besar untuk mengkaji bagaimana praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada LKS. Hal ini diyakini mempunyai perbedaan dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perbankan konvensional di Barat. Barat dan Islam sama-sama meyakini bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh setiap perusahaan. Akan tetapi, perbedaan mendasar antara barat dan Islam adalah terletak pada falsafah dan *tasawwur* yang melatarbelakangi konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sudut pandang Islam atau *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) berbeda dengan yang ada pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) Barat. *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dalam Islam dibangun atas dasar *tasawwur* (*world view*) dan epistemology yang berbeda dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan Barat. *Tasawwur* dan epistemology (I-CSR) didasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Keduanya menjadikan rujukan utama bagi pembentukan setiap konsep dan kriteria *Corporate Social Responsibility* (CSR). Manakala *Corporate Social Responsibility* (CSR) Barat didasarkan pada cara pandang masyarakat barat yang hanya menggunakan rasionalitas dan

juga dipengaruhi oleh keyakinan agama Kristen dan Budaya yang berkembang di Barat.<sup>88</sup>

*Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) juga merangkum makna taqwa, hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Jika dilakukan dalam aktivitas perniagaan, maka aktivitas tersebut dilakukan tidak hanya untuk memuaskan keperluan material, tetapi lebih untuk memenuhi kewajiban agama dan mencapai tujuan non-material, seperti keperluan keamanan sosial atau yang disebut dengan *social responsibility*, yaitu konsep dalam Islam yang berawal dari konsep *brotherhood* (kekeluargaan) dan *social justice* (keadilan sosial). *Social justice* akan melindungi Muslim dari perbuatan haram, Sedangkan *Brotherhood* merupakan konsep yang menyatakan bahawa sesama muslim adalah saudara, sehingga sesama muslim saling bertanggung jawab, khususnya terhadap orang yang tidak berkemampuan.<sup>89</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip *Islamic Corporate Social Responsibility*

Prinsip secara etimologi diartikan dasar, permulaan, aturan dasar, asas atau dasar yang menjadi pokok suatu pemikiran, kajian dan tindakan. Menurut Zuhaya, pengertian prinsip adalah sebagai permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda* (tempat mulai). Adapun secara terminology, prinsip adalah kebenaran secara umum yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.* h. 15.

<sup>89</sup> Wahyuddin, “*Islamic Corporate Social Responsibility*; Kajian Teoritis”, *Jurnal Akad*, Vol. 1 (2016), h. 49-50.

secara alami ada dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Ia adalah asas yang membentuk hukum dan melahirkan cabang-cabangnya. Oleh karena itu, prinsip dapat disimpulkan sebagai suatu asas atau landasan dasar yang dijadikan pijakan bagi landasan pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>90</sup>

Penjelasan terhadap prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dilakukan dalam beberapa kajian terdahulu, seperti kajian Ekawati (2005), Jamed Akhtar Mohammed (2007), Asyraf Wajdi Dusuki (2008), serta Asyraf Wajdi Dusuki dan Irwani Nurdianawati (2007). Prinsip-prinsip berdasarkan kajian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Prinsip Pelaksanaan CSR dalam Kajian Terdahulu**

Peneliti	Prinsip-prinsip Pelaksanaan CSR yang dihasilkan	Objektif Kajian
Ekawati (2005)	1. Zakat sebagai instrumen CSR	Untuk menyusun hubungan konsep zakat, CSR, dan pemberdayaan masyarakat pada Bank Muamalat Indonesia
Jamed Akhtar Mohammed (2007)	1. Tauhid 2. Keadilan 3. Bebas berkehendak 4. Bertanggungjawab	Untuk menjelaskan paradigma Islam terhadap CSR dan sejauh mana perbedaan dengan konsep CSR <i>mainstream</i> . Kajian ini juga melihat bagaimana nilai-nilai CSR dipraktekkan oleh

<sup>90</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Op.Cit.* h. 56.

		perbankan syariah melalui kesepakatan dengan pengurus bank syariah.
Asyraf Wajdi Dusuki (2008)	1. Khalifah 2. Takwa	Untuk mengkaji dan melahirkan konsep CSR dalam Islam serta membandingkannya dengan konsep CSR Barat.
Asyraf Wajdi Dusuki dan Irwani Nurdianawati (2007)	Pelaksanaan CSR dibagi kepada tiga kategori : 1. Kategori darurat ( <i>essentials</i> ). 2. Kepentingan ( <i>neccesary</i> ) 3. Kemewahan ( <i>embellishment</i> )	Untuk memberikan petunjuk bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan program CSR dengan pendekatan masalah dan teori <i>maqashid syariah</i> dalam perusahaan.

Sumber : Adiwarman Azwar Karim (2017)

Apabila ditelaah lebih dalam prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam penelitian terdahulu, maka boleh disimpulkan hanya ada tiga prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) Islam, yaitu prinsip tauhid dan keadilan oleh Jamed Akhtar Mohammed (2007) dan prinsip khalifah oleh Asyraf Wajdi Dusuki (2008). Adapun zakat yang dikemukakan Ekawati (2005) merupakan salah satu bentuk instrument yang dapat digunakan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara bebas berkehendak dan bertanggungjawab Mohammed (2007)



dan takwa Asyraf Wajdi Dusuki (2008) adalah efek yang timbul apabila prinsip-prinsip tauhid, keadilan dan khalifah dijalankan secara baik.<sup>91</sup>

Tiga prinsip yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu yaitu prinsip tauhid, keadilan, dan khalifah adalah prinsip yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penulis memberikan dua tambahan prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dijelaskan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu prinsip *ukhuwah* (persaudaraan) dan prinsip *maslahah* (penciptaan). Gabungan prinsip yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu dan tambahan dua prinsip dari apa yang telah peneliti lakukan akan menjadi *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan hanya menggugurkan *fardhu kifayah* dan memberikan efek positif bagi perusahaan tetapi juga menjadi salah satu kaidah untuk mengurangi angka kemiskinan dan mencapai tujuan ekonomi Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan *Islamic*

---

<sup>91</sup> *Ibid. h. 58*

*Corporate Social Responsibility (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah :*

### 1. Prinsip Tauhid

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* (kata dasar) dari kata “*wahhada-yuwahhidu-tauhid*” yang berarti mengesakan dan mengakui keesaan. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Sebagai akibat dari nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah, tempat meminta petunjuk, dan pertolongan.<sup>92</sup>

Bagi penyelenggara bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS), keyakinan kepada Allah SWT menjadikan seseorang yang melaksanakan bisnis di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah SWT. Siapapun yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak diperbolehkan melakukan transaksi ataupun bisnis yang tidak beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi ia mesti bertanggungjawab terhadap apa yang diusahakan dan selalu memberikan dampak positif dan kebajikan bagi lingkungan sekitar. Ini adalah buah dari keyakinan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan.

### 2. Prinsip *Khalifah*

---

<sup>92</sup> *Ibid.* h. 60.

Kata *Khalifah* merujuk kepada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia.

Pelaksanaan prinsip *khalifah* dalam konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menuntut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memaksimumkan fungsi dan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) guna meningkatkan dan memberdayakan pertumbuhan ekonomi seluruh *stakeholder*. Setiap keuntungan yang didapat bukanlah berasal dari keuntungan yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mengandung unsur riba, penipuan, dan investasi pada asset yang diharamkan. Sementara keuntungan yang diraih selalu disisihkan untuk memberikan dampak kebajikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar secara positif sesuai dengan tujuan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>93</sup>

### 3. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib dijiwai dengan sepenuhnya oleh nilai-nilai keadilan untuk mengurangi jurang ekonomi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat miskin. Pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip

---

<sup>93</sup> *Ibid.* h. 62.

utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua *stakeholder*.<sup>94</sup>

#### 4. Prinsip *Ukhuwwah*

*Ukhuwwah* diartikan sebagai persaudaraan, *Ukhuwwah* berasal dari kata yang pada dasarnya berarti memperhatikan. Arti kata ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara.

Prinsip persaudaraan inilah yang seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Saling membantu sesama pemegang berkepentingan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kelestarian tanpa merugikan satu sama lainnya.<sup>95</sup>

#### 5. Prinsip Mewujudkan *Maslahah*

*Maslahah* jamaknya *mashalih* yang mempunyai maksud kebaikan, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang bermakna kerusakan dan kebinasaan.

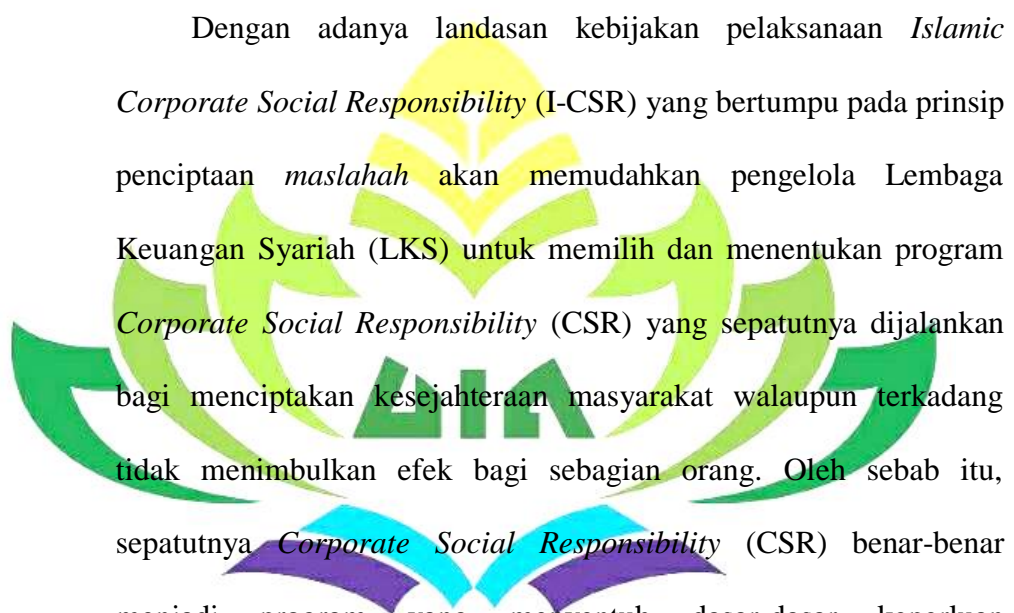
Ada dua landasan dasar pemeliharaan *kemaslahatan* atau *maqasid syariah* yang bisa dijadikan kebijakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan Islam dalam melakukan atau melaksanakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR). Pertama, sisi

---

<sup>94</sup> *Ibid.* h. 65.

<sup>95</sup> *Ibid.* h. 68.

positif yaitu dengan melakukan kegiatan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya *kemaslahatan*. Kedua, sisi negatif yaitu menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan *mafsadah* yang terjadi atau yang akan terjadi dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS).



Dengan adanya landasan kebijakan pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang bertumpu pada prinsip penciptaan *maslahah* akan memudahkan pengelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memilih dan menentukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sepatutnya dijalankan bagi menciptakan kesejahteraan masyarakat walaupun terkadang tidak menimbulkan efek bagi sebagian orang. Oleh sebab itu, sepatutnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) benar-benar menjadi program yang menyentuh dasar-dasar keperluan masyarakat, bukan malah menjadi simbol untuk menarik minat masyarakat dalam rangka meraih manfaat dan keuntungan yang lebih besar untuk perbankan.<sup>96</sup>

#### **4. Kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility***

Kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai hubungan yang erat dengan tiga konsep hubungan tanggung jawab sosial yang diperankan oleh manusia

---

<sup>96</sup> *Ibid.* h. 71.

sebagai khalifah di bumi. Tiga hubungan tanggung jawab sosial tersebut yaitu hubungan tanggung jawab manusia dengan Allah SWT, hubungan tanggung jawab manusia dengan sesama manusia, dan hubungan tanggung jawab manusia dengan alam sekitar. Ketiga hubungan tanggung jawab sosial ini didasarkan atas lima prinsip, yaitu tauhid, khalifah, keadilan, *ukhuwwah*, dan penciptaan *maslahah*.<sup>97</sup>

Oleh karena itu, tiga hubungan tanggung jawab sosial manusia di bumi dan lima prinsip dasar dalam membentuk hubungan tanggung jawab sosial menjadi penunjang terhadap pembentukan kriteria-kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dari lima prinsip hubungan tanggung jawab sosial manusia, telah dibentuk enam kriteria<sup>98</sup> *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Enam kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut, yaitu :

- a. Kepatuhan syariah
- b. Keadilan dan kesetaraan
- c. Bertanggungjawab dalam bekerja
- d. Jaminan kesejahteraan
- e. Jaminan kelestarian alam
- f. Bantuan kebajikan atau sosial

#### 1) Kriteria Kepatuhan Syariah

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Kriteria ialah satu ukuran yang boleh digunakan untuk mengukur kinerja sesuatu atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.



Kriteria kepatuhan syariah didasarkan pada kepentingan untuk menjaga setiap praktik dan investasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan pada tempat dan produk yang halal, sebagaimana yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

Untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam kaitannya dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka ada lima *item* (instrument) yang telah jelas dan memiliki hubungan erat untuk dijadikan sebagai instrument, yaitu :<sup>99</sup>

- 
- a) Instrument-instrumen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan ketentuan syariah
  - b) Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), diberikan sesuai dengan ketentuan syariah
  - c) Tempat dan produk yang halal
  - d) Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal
  - e) Pemilihan *stakeholder* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebenarnya untuk mengukur kriteria kepatuhan syariah dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini memiliki tujuan dari syariat Islam yaitu untuk menciptakan masalah dan mengikuti nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT.

---

<sup>99</sup>*Ibid.* h. 76-77

## 2) Kriteria Keadilan dan Kesetaraan

Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan menjelaskan bahwa manusia hidup dalam masyarakat sehingga memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan sesama manusia dalam berbagai aktivitas.

Oleh karena itu, dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai institusi keuangan Islam mesti mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukan pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Untuk mengukur kriteria kesamaan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka ada empat *item* yang bisa dijadikan sebagai instrument, yaitu :<sup>100</sup>

- a) Adanya nilai-nilai persaudaraan
- b) Pelayanan yang berkualitas
- c) Tidak ada diskriminasi
- d) Mempunyai kesempatan yang sama

Tujuan dari kriteria keadilan dan kesetaraan pada praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini merupakan bagian yang didasarkan pada komitmennya terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan. Keadilan dan kesejahteraan ini sesuai dengan peran dan fungsi setiap pihak. Proses produksi dan seluruh misi yang diemban dilakukan dengan cara-cara

---

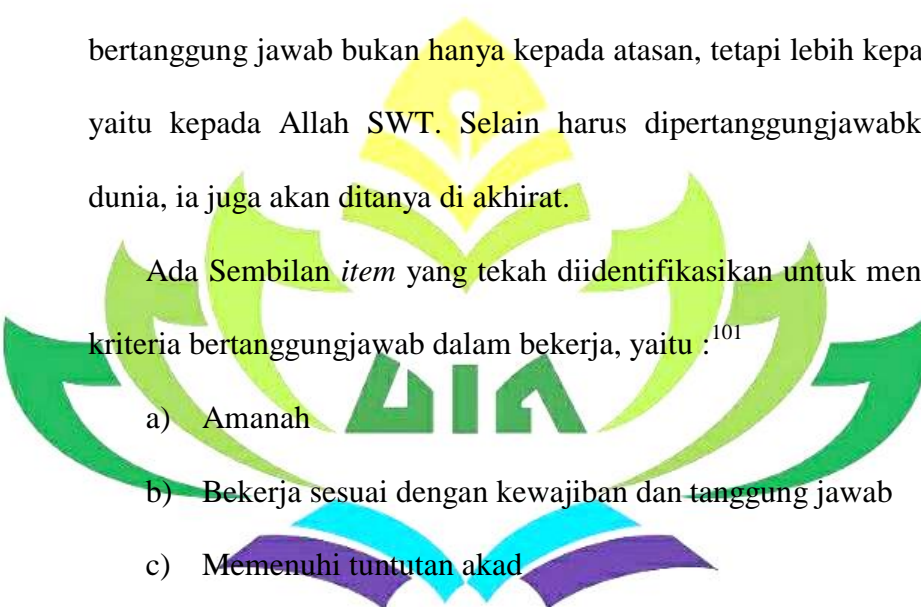
<sup>100</sup> *Ibid.* h. 78.

yang adil dan seimbang bagi keseluruhan pihak yang mesti diberlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban secara sepadan.

### 3) Kriteria Bertanggung Jawab dalam Bekerja

Bertanggung jawab dalam bekerja adalah sesuatu yang sangat *urgent* dalam kehidupan seorang Muslim. Setiap pekerja wajib bertanggung jawab bukan hanya kepada atasan, tetapi lebih kepada itu yaitu kepada Allah SWT. Selain harus dipertanggungjawabkan di dunia, ia juga akan ditanya di akhirat.

Ada Sembilan *item* yang telah diidentifikasi untuk mengukur kriteria bertanggung jawab dalam bekerja, yaitu :<sup>101</sup>

- 
- a) Amanah
  - b) Bekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab
  - c) Memenuhi tuntutan akad
  - d) Ikhlas
  - e) Optimal dalam penggunaan waktu
  - f) Mengurangi *image* buruk dalam investasi
  - g) Integritas dalam bekerja
  - h) Berlaku adil dalam persaingan
  - i) Akuntabilitas

Kriteria bertanggung jawab dalam bekerja ini merupakan tanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah SWT, terhadap

---

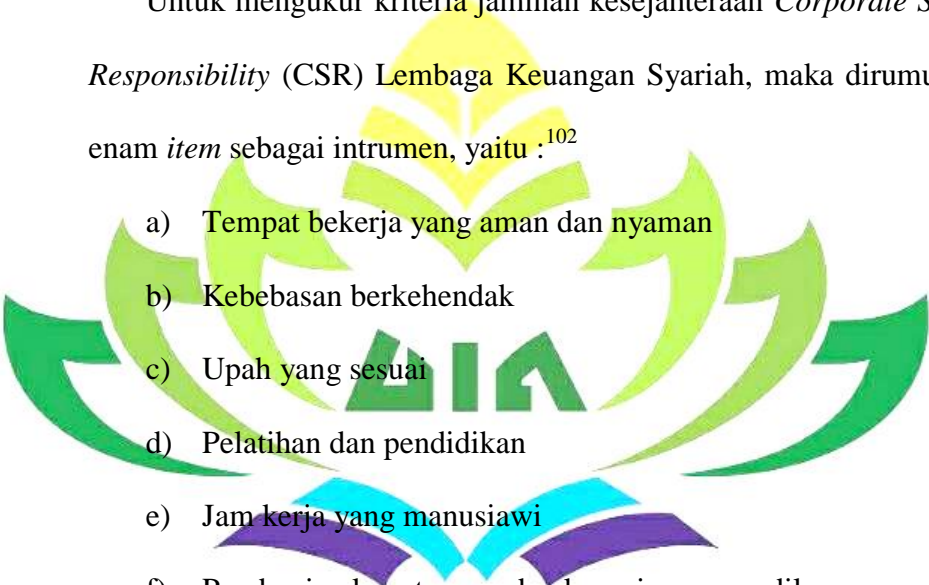
<sup>101</sup> *Ibid.* h. 81

diri sendiri dan masyarakat luas. Karena setiap apapun yang dikerjakan pasti menuntut adanya pertanggung jawaban.

#### 4) Kriteria Jaminan Kesejahteraan

Tujuan dibentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi siapa saja yang melakukan transaksi dengannya berdasarkan nilai-nilai Islam.

Untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Lembaga Keuangan Syariah, maka dirumuskan enam *item* sebagai instrumen, yaitu :<sup>102</sup>

- 
- a) Tempat bekerja yang aman dan nyaman
  - b) Kebebasan berkehendak
  - c) Upah yang sesuai
  - d) Pelatihan dan pendidikan
  - e) Jam kerja yang manusiawi
  - f) Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil

Tujuan untuk mengukur kriteria jaminan kesejahteraan ini untuk memungkinkan individu atau kelompok maupun masyarakat dapat memenuhi kebutuhan agar dapat hidup yang layak.

#### 5) Kriteria Jaminan Kelestarian Alam

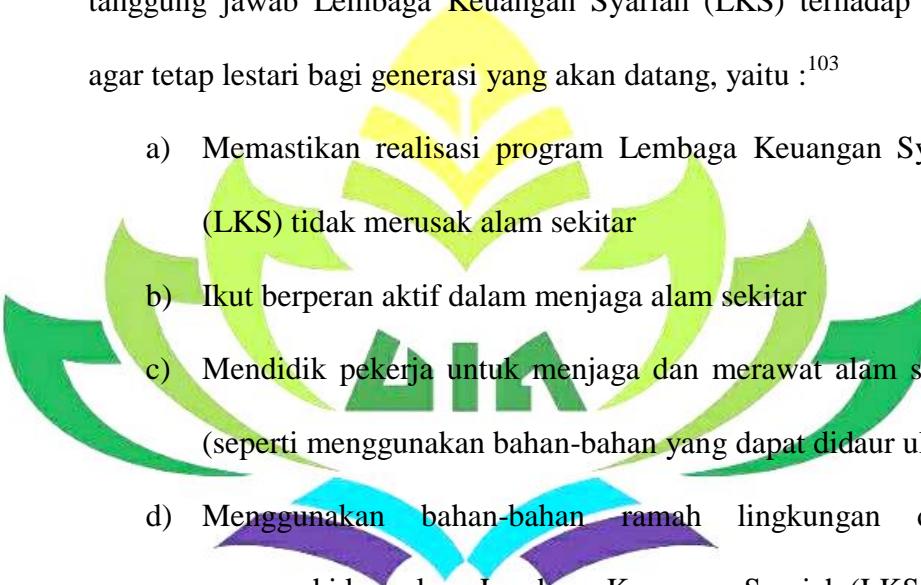
Hubungan baik antara alam semesta dan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi pelaksanaan penting sebagai tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya kepada manusia tetapi

---

<sup>102</sup> *Ibid.* h. 82-83.

juga bukti amanah kepada Allah SWT. Amanah ini diwujudkan dalam menjaga alam sekitar dan memastikan kelestarian alam untuk masa depan.

Ada empat *item* yang dapat dibangun untuk mengukur kriteria jaminan kelestarian alam terlaksana dengan baik dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap alam, agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang, yaitu :<sup>103</sup>

- 
- a) Memastikan realisasi program Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak merusak alam sekitar
  - b) Ikut berperan aktif dalam menjaga alam sekitar
  - c) Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar (seperti menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang
  - d) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Dalam kriteria jaminan kelestarian alam yang dilakukan oleh perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus ramah lingkungan, artinya perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan.

#### 6) Kriteria Bantuan Sosial

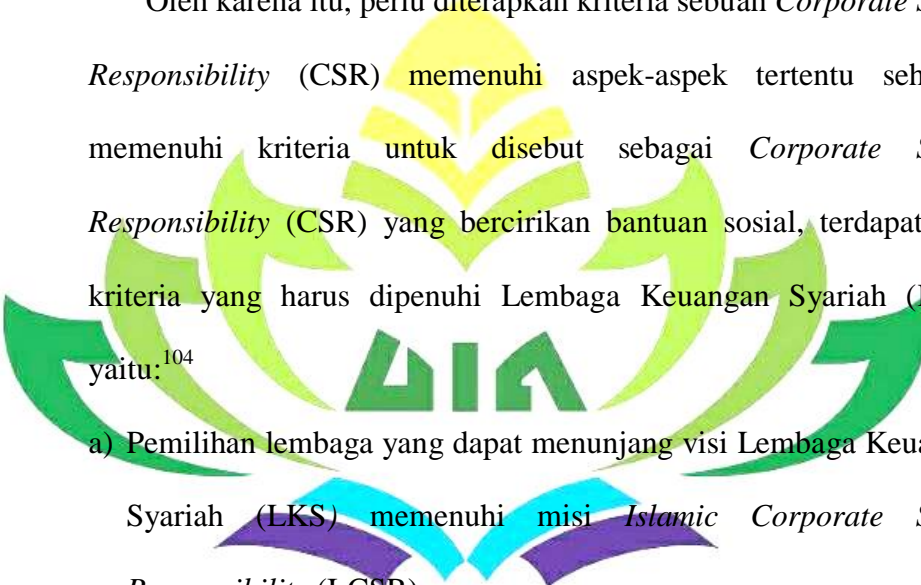
---

<sup>103</sup> *Ibid.* h. 84-85.

Islam sangat menganjurkan bantuan sosial diberikan kepada siapa saja dari golongan orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai suatu lembaga dengan sistem ekonomi syariah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perlu diterapkan kriteria sebuah *Corporate Social Responsibility* (CSR) memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga memenuhi kriteria untuk disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bercirikan bantuan sosial, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu:<sup>104</sup>

- 
- a) Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memenuhi misi *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR).
  - b) Ikut meringankan masalah sosial (seperti bantuan sosial)
  - c) Membantu program sosial kemasyarakatan (seperti membantu dana pendidikan, dan meringankan beban kehidupan anak yatim)
  - d) Menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata-mata

---

<sup>104</sup> *Ibid.* h. 85-86.



- e) Pemberdayaan masyarakat melalui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (seperti *qardhul hasan*, pembiayaan mikro ekonomi untuk usaha kecil dan menengah (UKM)).

Berdasarkan kriteria-kriteria *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu bentuk pertanggung jawaban kepada Allah SWT, manusia dan alam sekitar. Pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) benar-benar diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk menyelesaikan dan meringankan masalah sosial, sehingga akan mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat.

##### **5. Manfaat Program *Islamic Corporate Social Responsibility***

Pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membawa manfaat yang cukup signifikan tidak hanya pada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu saja akan tetapi pihak sasaran aktivitas sosial juga. Dampak positif yang diterima masyarakat sebagai bagian komunitas sekitar perusahaan adalah terpenuhinya tuntutan masyarakat melalui aspek. Tanggung jawab sosial suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan atas dasar bentuk pertanggungjawabannya pada Allah melalui perhatian terhadap

lingkungan sosial. Karena dengan keyakinan memperoleh balasan yang lebih baik dari apa yang diberikan dengan ikhlas, maka dari itu salah satu poin penting terlaksananya kegiatan *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Ketercapaian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam meningkatkan kinerja sosial (*social performance*) ternyata juga mengandung konsekuensi ekonomi (*economic consequences*). Sehingga, mendukung ketercapaian perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, termasuk nilai bagi investor (*marketvalue*) dan meningkatnya citra perusahaan.<sup>105</sup>

Manfaat yang ditimbulkan dari tercapainya program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), antara lain :<sup>106</sup>

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan
- b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- d) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e) Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- g) Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*

---

<sup>105</sup> Ani Yuningsih, *Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Publisitas, Citra, Dan Etika, dalam Profesi Public Relation*, (terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005), Vol. 6 No.2 (Desember 2005), h. 320.

<sup>106</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. Cit.* h. 6-7.

- h) Memperbaiki hubungan dengan regulator
- i) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j) Peluang mendapatkan penghargaan.

Pada dasarnya dengan menerapkan pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ada banyak manfaat yang akan diterima dan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi operasional perusahaan, akan tetapi juga bagi keberlangsungan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Keuntungan yang diraih melalui program ini antara lain : dapat mengurangi biaya, mengurangi risiko, membentuk reputasi, meningkatkan akses pasar lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

## **C. KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **1. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Secara harfiah, kesejahteraan sosial mengandung arti yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu. Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup). Adapun, sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya).<sup>107</sup>

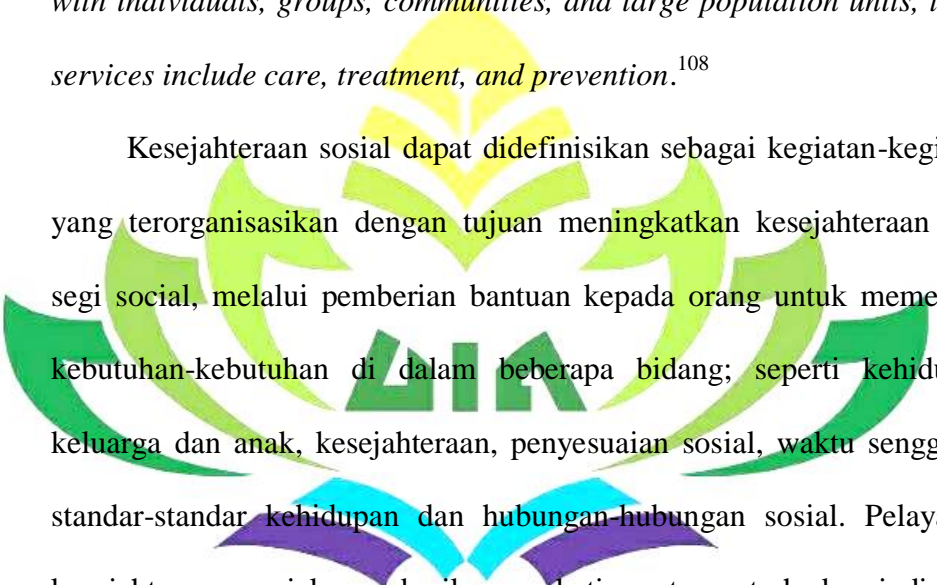
Kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang usaha kemanusiaan yang luas dan mencakup jenis-jenis badan organisasi, serta macam-

---

<sup>107</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), h. 887.

macam pelayanan. Dalam hal ini ia mengemukakan definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut :

*Social welfare may be defined as organized activities of promotion of social well-being through helping people to meet needs in such areas as family and child life, health, social adjustment leisure time, standards of living, and social relationships. Social welfare services are concerned with individuals, groups, communities, and large population units, these services include care, treatment, and prevention.*<sup>108</sup>



Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi social, melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang; seperti kehidupan keluarga dan anak, kesejahteraan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan social memberikan perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas, pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksudkan dengan : Kesejahteraan Sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

---

<sup>108</sup> Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 38.

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>109</sup> Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Prioritas diberikan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>110</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah sekelompok manusia yang telah memiliki tatanan hidup dimana dalam kehidupannya telah terpenuhi segala bentuk kebutuhan hidup khususnya makan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan atau terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial. Sedangkan tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak.

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).

<sup>110</sup> Nur Kholis, Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 (Juli – Desember 2015), h. 252-253.

## 2. Indikator Kesejahteraan

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengambil informasi keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan.<sup>111</sup> Selain adanya indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian menurut beberapa ahli dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam ada kesejahteraan Islami yang tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.<sup>112</sup> Indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, *ridha dan qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.<sup>113</sup>

Berikut adalah perbedaan antara indikator keluarga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan indikator kesejahteraan Islami menurut beberapa ahli dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam :

---

<sup>111</sup> Katalog BPS, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), h. 61.

<sup>112</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-13.

<sup>113</sup> Ziauddin Sardar, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 5 (Mei 2016), h. 394.



**Tabel 1.2 Perbedaan Antara Indikator Kesejahteraan Keluarga dan Indikator Kesejahteraan Islami**

No	Indikator Kesejahteraan Keluarga	Indikator Kesejahteraan Islami
1.	Pendapatan : seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu	<i>Ad-dien</i> (Memelihara Agama) : implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji) dan tercapainya amalan rukun iman
2.	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga : indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat	<i>An-nafs</i> (Memelihara Jiwa) : dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya
3.	Keadaan tempat tinggal : jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai	<i>Al-aql</i> (Memelihara Akal) : dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat <i>dharuriyah</i> misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat <i>hajjiyah</i> seperti dianjurkannya menuntut ilmu

		pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat <i>tahsiniyyah</i> yaitu misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat
4.	Fasilitas tempat tinggal : pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, WC dan jarak WC dari rumah	<i>An-nasl</i> (Memelihara Keturunan) : sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-Nya
5.	Kesehatan anggota keluarga : keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis	<i>Al-maal</i> (Memelihara Harta) : mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan <i>thoyib</i> , serta persaingan yang adil
6.	Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan : jarak	

	rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, dan alat kontrasepsi	
7.	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan : biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan	
8.	Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi : ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan	

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mengambil informasi keadaan dasar ekonomi masyarakat yaitu mengenai sandang, pangan dan papan atau terpenuhinya kebutuhan materi. Sedangkan menurut beberapa ahli dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, indikator kesejahteraan Islami tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Kesejahteraan sosial juga merupakan suatu sistem dari suatu lembaga atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk membantu

masyarakat agar mencapai kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.

### 3. Kesejahteraan Sosial dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang, mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Menurut P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:<sup>114</sup>

- a. Kesejahteraan *holistik* dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa,

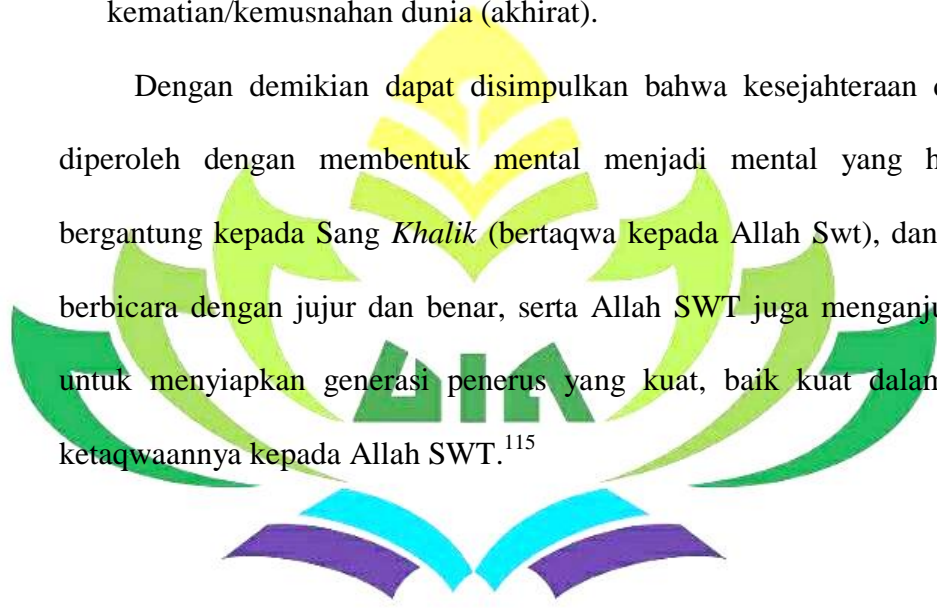
---

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 396.

karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang *Khalik* (bertaqwa kepada Allah Swt), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015), h. 392.

## BAB III

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum PT Bank BNI Syariah

##### 1. Sejarah Berdirinya PT Bank BNI Syariah

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan bank umum pemerintah pertama yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil keputusan Direksi Tanggal 18 April 2005 dan surat keputusan Direksi No.KP/712/DIR/R tanggal 26 April 2005 maka telah ditetapkan sistem manajemen Bank BNI Syariah yang didesain secara berbeda dengan unit-unit bisnis yang ada di Bank BNI.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum

---

<sup>116</sup> Website resmi PT Bank BNI Syariah: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 20.00 WIB.



Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point serta 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama.<sup>117</sup>

Perkembangan sejarah singkat BNI Syariah secara lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Sejarah Singkat BNI Syariah**

No	Tahun	Keterangan
1	2000	PT Bank BNI Tbk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap system perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dimulai dengan membuka 5 kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni : Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.
2	2002	BNI membuka 2 kantor cabang syariah baru di kota Medan dan Palembang. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI menghasilkan laba pertama sebesar Rp. 7,189 miliar dengan dukungan tujuh cabang.
3	2003-2004	Berturut-turut Unit Usaha Syariah (UUS) BNI mendapatkan penghargaan sebagai “ <i>The Most Profitable Islamic Bank</i> ” diantara dua Bank Umum Syariah (BUS) dan delapan Unit Usaha Syariah (UUS).

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

4	2009	Pembentuk Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang akan mentransformasikan UUS BNI menjadi PT Bank BNI Syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 Tanggal 19 Maret 2009 Tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.
5	2010	Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 BNI Syariah berhasil membuka aset sebesar Rp. 6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.
6	2011	PT Bank BNI Syariah membuka laba Rp. 66 miliar dengan dukungan 38 cabang, 54 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas serta lebih dari 1.000 Syariah Channeling Outlet BNI (SCO BNI) dengan total aset Rp. 8,4 triliun pada akhir Desember 2011.
7	2012	Pencapaian aset Rp. 10 triliun pada 10 November 2012. Outlet BNI Syariah mikro mulai beroperasi, penambahan outlet regular 10 cabang BNI Syariah memperoleh award sebanyak 16 penghargaan selama tahun 2012. Logo BNI Syariah disemua outlet BNI dan ATM BNI sebagai sinergi dengan induk. Perbaikan dan efisiensi system internal. CASA terbaik diantara seluruh perbankan syariah.

Sumber : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Pembukaan kantor cabang BNI Syariah di Tanjung Karang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dengan tujuan sebagai usaha melakukan ekspansi menambah jaringan dan memiliki 38 pegawai tetap dan 30 pegawai *outsourcing* yang dipimpin oleh Bapak Ichsan Mahyudi. Kantor cabang ini merupakan outlet ke-31 yang dimiliki BNI Syariah dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan membuka kantor cabang di kota-kota lainnya. Acara pembukaan kantor BNI Syariah Cabang Tanjung Karang

ini dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor baru BNI cabang pasar pusat Tanjung Karang yang dihadiri oleh Gubernur Sjachroedin Z.P, Wali Kota Bandar Lampung Drs. Eddy Sutrisno, M.Pd, Direktur BNI Suroto Moehadji, Pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan pemuka Agama Tanjung Karang. BNI Syariah siap memasuki pasar awal 2010.<sup>118</sup>

BNI Syariah Bandar Lampung memiliki 2 Kantor Cabang yaitu KC Tanjung Karang dan KC Mikro Teluk Betung serta 5 Kantor Cabang Pembantu yaitu KCP Bandar Jaya, KCP Mikro Pringsewu, KCP Mikro Antasari, dan KCP Unit 2 Banjar Agung.

## **2. Profil PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

### **a. Profil Perusahaan**

Nama : BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 62 Bandar Lampung

Tanggal Awal Beroperasi: 21 Juli 2005

Jumlah Karyawan : 70 Karyawan

Kegiatan Usaha : Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar BNI Syariah No. 160 tanggal 22 Maret 2010.

---

<sup>118</sup>Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, 2017.

b. Letak Geografis

Lokasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang merupakan lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di daerah Bandar Lampung, tepatnya di jalan Jendral Sudirman No. 62 Bandar Lampung. Terletak di lingkungan penduduk yang mengandalkan kehidupan perdagangan, bisnis dan pengusaha.

**3. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah Insha Allah membawa berkah.<sup>119</sup>

b. Misi BNI Syariah

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>120</sup>

Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi No.BNISy/DIR/403.

---

<sup>119</sup> Website resmi PT Bank BNI Syariah, *Op. Cit.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, hukum positif, serta regulasi yang berlaku di Indonesia, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu Amanah dan Jama'ah. Hasanah merupakan Tata Nilai Perusahaan (*Corporate value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai yang disusun dengan semangat memberikan kebaikan membangun nilai-nilai, baik pada setiap Produk, Jasa serta perilaku keseharian Insan hasanah. Sosok Insan hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan pilar-pilar Amanah dan Jama'ah.

#### **4. Produk dan Layanan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

##### **a. Produk Simpanan**

Adapun produk simpanan yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

##### **1) Tabungan BNI iB Hasanah**

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

##### **2) Tabungan BNI Bisnis iB Hasanah**

Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku

tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

3) Tabungan BNI Prima iB Hasanah

Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high network individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

4) Tabungan BNI Tapenas iB Hasanah

Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan system setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

5) Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah

Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan system setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.



6) Tabungan BNI Tunas iB Hasanah

Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun.

7) BNI Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadiah yadh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

8) BNI Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan terdapat pilihan mata uang Rupiah dan USD serta terdapat pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

**b. Produk Pembiayaan Konsumer**

Adapun Produk Pembiayaan Konsumer yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

1) Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli,

membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartement dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

2) Pembiayaan BNI *Oto iB Hasanah*

*Oto iB Hasanah* adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

3) Pembiayaan BNI *Emas iB Hasanah*

*Emas iB Hasanah* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad *murabahah*.

4) Pembiayaan BNI *Multiguna iB Hasanah*

*Multiguna iB Hasanah* adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

5) Pembiayaan BNI *Fleksi iB Hasanah*

*Fleksi iB Hasanah* adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket

perjalanan Ibadan Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

6) Pembiayaan BNI *Cash Collateral Financing* iB Hasanah

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

Pilihan produk yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah merupakan salah satu keunggulan BNI Syariah.

**c. Fasilitas Jasa**

Adapun fasilitas jasa yang disediakan oleh BNI Syariah cabang Tanjung Karang antara lain sebagai berikut :

1) Kiriman Uang (KU)

Kiriman Uang (KU) adalah suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang lainnya atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain berdasarkan prinsipin *al wakalah*.

2) Inkaso

Inkaso adalah pengiriman uang atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut dengan prinsip *al wakalah*.

### 3) Kliring

Kliring adalah suatu tata cara perhitungan penagihan surat-surat berharga dari satu bank peserta kliring terhadap bank peserta lainnya agar perhitungan tersebut terselenggara dengan mudah, aman serta dapat memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dengan prinsip *al wakalah*.

### 4) Layanan *Phoneplus*

Layanan *Phoneplus* adalah layanan transaksi perbankan melalui telepon 24 jam dalam mendapatkan segala informasi produk dan jasa BNI dan dapat melakukan transaksi perbankan dengan jaminan privasi yang tinggi serta tidak dibatasi ruang, waktu dan gerak.

### 5) ATM BNI

ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin anjungan tunai mandiri yang ditempatkan di cabang BNI atau BNI Syariah dan tempat tertentu yang dapat digunakan oleh nasabah tertentu dengan melayani diri sendiri dan menggunakan kartu syariah plus dan kartu syariah prima untuk mengambil uang tunai di seluruh ATM BNI.

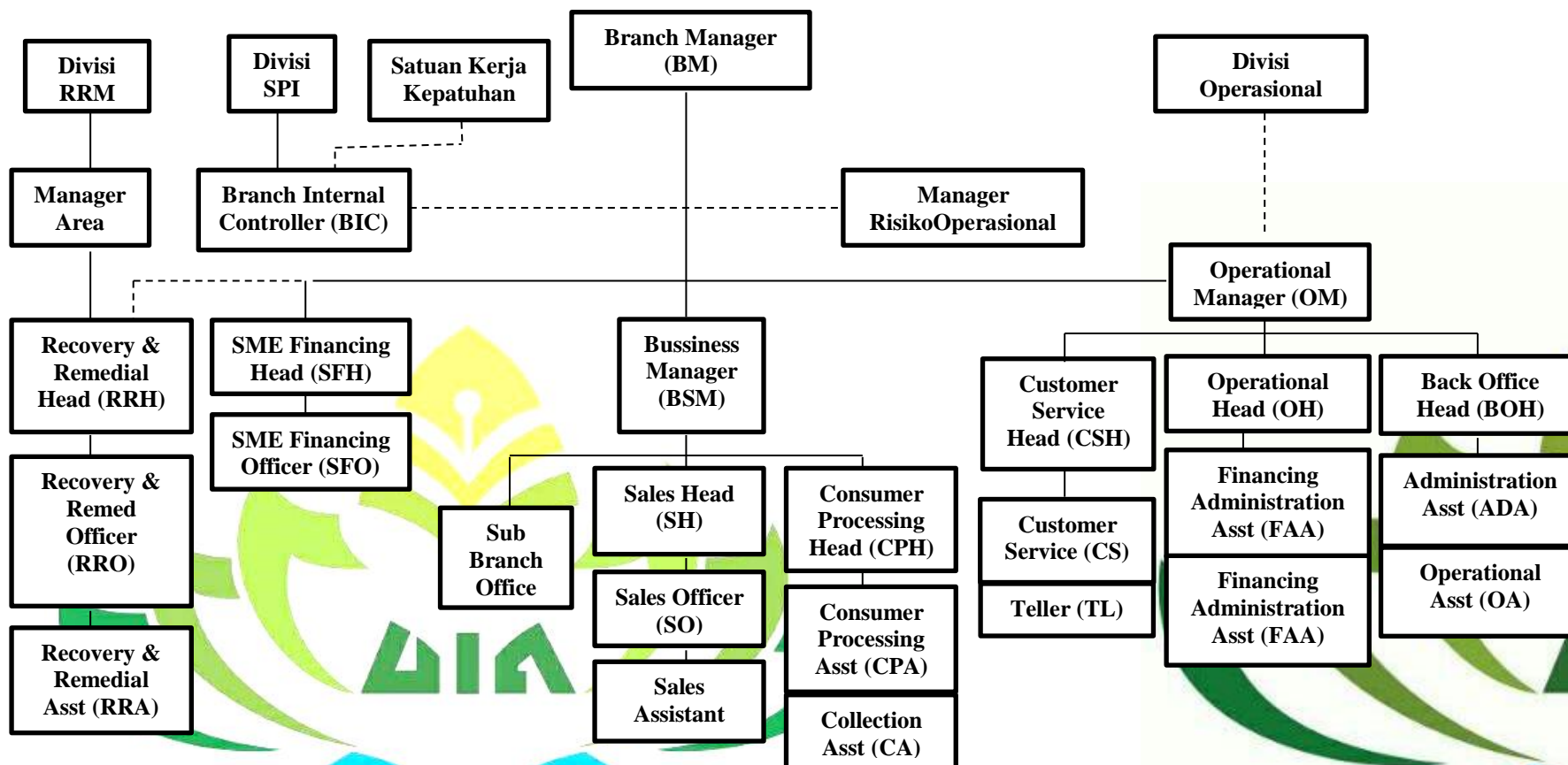
## 5. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Struktur Organisasi PT Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, *Op. Cit.*

## Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang



Gambar 1.2  
Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Sumber: Arsip BNI Syariah

## **B. Implementasi dan Regulasi Akad *Qardhul Hasan* pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

Implementasi akad *Qardhul Hasan* didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang *al-qardh*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 7/26/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah.

Transaksi *qardhul hasan* di BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang harus memenuhi berbagai persyaratan baik administrasi maupun sebagai identifikasi calon nasabah. Beberapa persyaratan kelengkapan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>122</sup>

1. Fotocopy KTP atau kartu identitas diri
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Selain beberapa persyaratan di atas, hasil dari wawancara penulis dengan bagian pembiayaan *qardhul hasan* dijelaskan secara sederhana mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor BNI Syariah KC Tanjung Karang
2. Konsultasi mengenai kebutuhan nasabah

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Dedi Kurniawan, Operational Assistant BNI Syariah KC Tanjung Karang, tanggal 19 Desember 2017.



3. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
4. Mengisi formulir dan membayar administrasi sebesar Rp. 50.000,- serta biaya 4 lembar materai 6000.
5. Berkas nasabah masuk ke bagian umum untuk diarsip sebagai dokumen baru
6. Proposal pengajuan dari bagian umum diserahkan kepada pimpinan untuk didisposisikan
7. Jika disetujui berkas akan langsung diserahkan kepada *supervisor* yang dalam hal ini adalah kepala bagian *Qardhul Hasan*
8. Setelah ditelaah dan disetujui diberbagai tahap bagian barulah berkas tersebut di verifikasi kelengkapan datanya kembali serta verifikasi rincian dana dari yang dibutuhkan sampai yang akan dikabulkan atau dicairkan
9. Kemudian melakukan survey berdasarkan data yang ada pada berkas, baik survey tempat usaha, kondisi lingkungan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan indentifikasi bank terhadap calon nasabah
10. Hasil survey kemudian dikemas ke dalam sebuah laporan dengan berbagai tahap yaitu:
  - a. *Call memo* (laporan hasil survey)
  - b. *Advice* (memberikan laporan secara lebih detail)
  - c. SKP (Surat Keputusan Pembiayaan)

11. Hasil survey sangat menentukan layak atau tidaknya pembiayaan, apabila dinilai layak barulah pihak BNI Syariah akan membuat akad sebagai bukti dimulainya suatu perjanjian.
12. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan *qardhul hasan*, pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang akan mencairkan dana melalui pembukaan buku tabungan baru untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya serta sebagai media angsuran bagi nasabah. Kebijakan BNI Syariah KC Tanjung Karang ini menetapkan besarnya pembiayaan *qardhul hasan* untuk 1 orang adalah maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu angsuran pembiayaan maksimal adalah 24 bulan.

### **C. Implementasi Program *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang**

Tujuan BNI Syariah dalam implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) adalah untuk menginspirasi nilai-nilai Hasanah kepada masyarakat sekitar. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan merupakan salah satu misi BNI Syariah yang berkaitan erat dengan komitmen terhadap implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab, BNI Syariah berkomitmen untuk mengedepankan kinerja dan pencapaian yang tidak hanya diukur melalui profit semata. Oleh karena itu, program *Islamic Corporate Social*

*Responsibility* (I-CSR) menjadi bentuk perwujudan investasi sosial BNI Syariah kepada masyarakat. Melalui implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang berkelanjutan dan terarah, BNI Syariah berharap agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kehadiran perusahaan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari sisi penerima, program tanggung jawab sosial harus disesuaikan dengan ketentuan syariat yang mengatur dengan tegas kelompok-kelompok penerima program, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori *ashnaf* di antaranya fakir, miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan/musafir.

Agar lebih fokus dalam menjalankan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR), BNI Syariah telah menetapkan 3 pilar yang menjadi lingkup/landasan pokok, yaitu : <sup>123</sup>

a. Program Bidang Sosial

BNI Syariah KC Tanjung Karang mendukung kegiatan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang ini secara berkelanjutan, agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan masa depan.

---

<sup>123</sup> [www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/AR-BNI-Syariah-IND-28-4-2017\\_Part4.pdf](http://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/PDF/AR-BNI-Syariah-IND-28-4-2017_Part4.pdf) (29 Januari 2018).

Setiap agama mempunyai prinsip dasar yang sama untuk berbagi, menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Seperti : mengadakan kajian rutin satu bulan sekali di kantor BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan mengundang 50 orang dari anak-anak binaan Daarut Tauhid dan beberapa panti asuhan seperti panti asuhan Al-Banat dan TPA Terapung. Kemudian setiap anak diberi santunan lebih dari Rp. 50.000,- Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan masyarakat.

b. Program Pembangunan

BNI Syariah KC Tanjung Karang melakukan perencanaan, mengimplementasikan, dan mendukung pembangunan sarana umum demi kelangsungan taraf hidup yang lebih baik. BNI Syariah KC Tanjung Karang memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum, seperti membantu Pembangunan Mushola di Pondok Pesantren yatim piatu penghawal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin Jalan Dr. Harun II Komplek vila mas kelurahan Kota baru, pembangunan fasilitas toilet dan bantuan renovasi rumah ustadz di pondok pesantren Al Munawwirussholeh Jalan Moch. Roem Gg. Renville Sumur Putri Teluk Betung Bandar Lampung.

c. Program Pendidikan

BNI Syariah KC Tanjung Karang turut membina dan membantu perkembangan komunitas terutama dalam bidang pendidikan dengan memperhitungkan sensitivitas dan kesesuaian dengan

kultur serta kebutuhan masyarakat. Berbagai kegiatan telah dirancang dan diterapkan guna berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara nyata, BNI Syariah KC Tanjung Karang mewujudkan tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan melalui program bantuan penyediaan berbagai sarana pendukung pendidikan, seperti buku, dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak binaan Daarut Tauhid dan panti asuhan pada saat milad BNI Syariah KC Tanjung Karang.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Analisis Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility*

##### 1. Analisis Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Akad *Qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya. Hal itu merupakan salah satu kepedulian BNI Syariah KC Tanjung Karang kepada karyawan kontrak BNI Syariah KC Tanjung Karang. Para karyawan yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan penambahan modal bagi usahanya, bisa mendapatkan pinjaman dengan menggunakan akad *qardhul hasan* dari BNI Syariah KC Tanjung Karang.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Dedi Kurniawan mengenai pelaksanaan *qardhul hasan* di BNI Syariah KC Tanjung Karang ini tidak terlepas dari tanggung jawab lembaga sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu dengan adanya *qardhul hasan* ini adalah untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah *financial*. *Qardhul hasan* adalah akad *tabarru'* atau akad yang didasarkan atas dasar tolong-menolong (kebajikan), yang teraplikasi



dengan jenis pinjaman dimana dalam pengembaliannya tidak disertai margin.<sup>124</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Winanda selaku SME (*Small Medium Enterprise*) *Financing Head* BNI Syariah KC Tanjung Karang didapatkan informasi bahwa pembiayaan produk *qardhul hasan* itu tidak komersil dan biasanya digunakan untuk pegawai. Akad *qardhul hasan* ini sifatnya talangan dan akad *qardhul hasan* tidak memperbolehkan untuk mengambil tambahan atau tidak boleh mengambil margin. Misalnya, kita pinjam Rp. 1.000 dan harus dikembalikan juga senilai Rp. 1.000.<sup>125</sup>

Dari penelitian yang telah dilakukan, BNI Syariah KC Tanjung Karang telah memberikan dana *qardhul hasan* ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan, akan tetapi peminjam harus mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut. Tujuannya untuk melatih rasa tanggungjawab peminjam. Dalam hal ini BNI Syariah KC Tanjung Karang memberikan kelapangan untuk meminjamkan dana yang terdapat dalam produk *qardh* yang bersifat *non profit*. Sumber dana pinjaman *qardhul hasan* ini didapat dari nasabah, masyarakat dan karyawan yang membayar zakat, menyalurkan infak, dan sedekah melalui BNI Syariah KC Tanjung Karang. Selanjutnya dana

---

<sup>124</sup> Dedi Kurniawan, *Operational Assistant* BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 19 Desember 2017.

<sup>125</sup> Rudi Winanda, SME (*Small Medium Enterprise*) *Financing Head* BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 12 Januari 2018.

*qardhul hasan* diperoleh dari dana pendapatan non halal yang diperoleh BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dana pendapatan non halal merupakan pendapatan atau bunga yang diperoleh BNI Syariah KC Tanjung Karang dari penerimaan jasa giro dan dari nasabah berupa denda. Denda disini ialah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan BNI Syariah KC Tanjung Karang, seperti terlambat atau tidak melunasi pinjaman. Perolehan dana non halal tidak perlu dilaporkan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang pada Bank Indonesia. Sehingga penggunaan pendapatan non halal merupakan kebijaksanaan BNI Syariah KC Tanjung Karang untuk mengalokasikan dana tersebut. Karena hasilnya pun tidak perlu dilaporkan pada Bank Indonesia.

Hasil pendapatan non halal bank seharusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara yang baik seperti mengalokasikan dana untuk produk *Qardhul Hasan*. Karena sesuai dengan kaidah fikih, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka akan menjadi dana haram.<sup>126</sup>

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, percampuran antara hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam setiap persoalan, baik dalam konstruksi ibadah maupun muamalah. Islam sebagai agama sempurna telah memberikan rambu-rambu untuk dijadikan pijakan dalam melangkah, agar umat Islam dalam

---

<sup>126</sup> H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim, Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah, *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 15, No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 172.

hidup dan kehidupannya terhindar dari unsur-unsur haram, sehingga bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Jika terdapat percampuran antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat dua hukum : halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan dan dosa.

BNI Syariah KC Tanjung Karang menyalurkan dana dalam bentuk *qardhul hasan* karyawan. Yaitu berupa pinjaman dana segar tanpa bunga yang ditujukan hanya untuk karyawan kontrak atau karyawan *outsourcing* BNI Syariah KC Tanjung Karang yang dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, ataupun kebutuhan penting yang mendesak lainnya, yang sebelumnya ditinjau dahulu seberapa pentingnya pinjaman tersebut. Adapun besarnya dana yang bisa dicairkan adalah maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan diangsur dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan. Bagi nasabah yang telah melunasi pinjaman kurang dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka boleh mengajukan pinjaman kembali kepada BNI Syariah KC Tanjung Karang.

Pendanaan *qardhul hasan* karyawan memiliki proses pencairan dana yang cepat. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Kiswantoro selaku *office boy* BNI Syariah KC Tanjung Karang dan juga nasabah *qardhul*

*hasan*. Menurut penuturannya, proses pengajuan untuk nasabah pinjaman langsung datang ke kantor BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan membawa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, kemudian mengisi formulir-formulir pengajuan permohonan *qardhul hasan* yang isinya adalah besarnya dana yang diajukan serta dana yang dibutuhkan digunakan untuk keperluan apa dan jangka waktu masa waktu peminjaman. Untuk besarnya dana yang diajukan adalah Rp. 3.000.000,- diangsur selama sepuluh bulan untuk angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 300.000,- dan kebutuhan dana diajukan untuk keperluan membayar sewa kontrak rumah. Dana dapat dicairkan kira-kira tiga hari setelah proses pengajuan. Sebelumnya nasabah menandatangani surat perjanjian. Untuk biaya administrasi pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang menerapkan sebesar Rp. 50.000,- serta biaya 4 lembar materai 6000.<sup>127</sup>

**Tabel 1.3 Daftar Pinjaman *Qardhul Hasan* BNI Syariah KC Tanjung Karang Tahun 2017**

NO	NAMA	ANGS	JMLH ANGS	BLN	JMLH PNJMN
1	Kiswantoro	10	300.000	10	3.000.000
2	Jauhari	9	250.000	20	5.000.000
3	Iwan Supriyatna	9	250.000	20	5.000.000
4	Malik Abdul Aziz	8	250.000	20	5.000.000
5	Arpani	8	150.000	20	3.000.000

---

<sup>127</sup> Kiswantoro, *Office Boy* BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 15 Februari 2017.

6	Dwi Saputro	5	500.000	10	5.000.000
7	Aeng Mulyana	5	250.000	20	5.000.000
8	Ujang Jana Komara	3	250.000	20	5.000.000
9	Hendi Harwoko	3	400.000	10	4.000.000
10	Hermansyah	1	200.000	20	4.000.000

Sumber : BNI Syariah KC Tanjung Karang

**Tabel 1.4**  
**Contoh Pembiayaan *Qardhul Hasan* BNI Syariah KC Tanjung Karang**

Nama Nasabah	Kiswantoro
Jenis Pembiayaan	<i>Qardhul Hasan</i>
Besarnya Pembiayaan	Rp. 3.000.000,-
Masa Angsuran	10 Bulan
Nilai Per Angsuran	Rp. 300.000,-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-

Sumber : data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sasaran utama pembiayaan *qardhul hasan* adalah pegawai-pegawai kontrak atau pegawai *outsourcing* BNI Syariah KC Tanjung Karang yang dianggap layak menerima atau yang sedang berada dalam keadaan terdesak dengan kriteria tertentu. Pegawai-pegawai kontrak seperti pegawai baru, *office boy*, satpam, *driver* dan lain sebagainya. Penerima pembiayaan hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan secara sekaligus atau diangsur dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi dan biaya lainnya untuk keperluan pembuatan perjanjian atau akad.

Pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* tidak ada larangan bagi nasabah yang pernah mengajukan pinjaman *qardhul hasan* dan kemudian ingin melakukan pinjaman ulang setelah peminjaman sebelumnya

selesai, dengan syarat nasabah yang bersangkutan tidak membuat masalah yang berarti, misalnya melakukan kecurangan, dengan lari dari tanggung jawab serta membawa uang pinjaman tanpa pelunasan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga survey untuk kedua kalinya akan semakin mudah, hal ini dikarenakan kredibilitas nasabah tersebut telah diakui.

Menurut peneliti berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai BNI Syariah KC Tanjung Karang terhadap respon dalam menggunakan pembiayaan melalui akad *qardhul hasan*, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Hermansyah selaku pegawai kontrak BNI Syariah KC Tanjung Karang dan juga nasabah yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* untuk menambah modal dalam peningkatan usaha kecilnya. Dengan adanya produk *qardhul hasan* BNI Syariah KC Tanjung Karang sangat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan serta membantu terbebas dari tujuan berhutang kepada renternir. Dimana sering dijumpai pemerolehan modal diringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi, sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi bomerang bila terjadi kemacetan angsuran.<sup>128</sup>

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh Hendri Hermawan A.N, menyimpulkan bahwa *qardhul hasan* ialah pinjaman sosial yang

---

<sup>128</sup> Hermansyah, *Office Boy* BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 15 Februari 2018.



diberikan kepada kaum du'afa di mana terdapat kemungkinan *muqtaridh* tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, karena *muqtaridh* tergolong sebagai mustahiq dan berhak menerima zakat.<sup>129</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Su'ud menjelaskan terdapat tiga alternatif yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif *al-qardhul hasan* yaitu :

- a. Memperluas pangsa pasar (*market share*), yaitu kepada delapan *ashnaf* hal ini untuk menjawab bahwa *al-qardhul hasan* tidak hanya untuk fakir miskin dan untuk permodalah usaha mikro.
- b. Melakukan inovasi pengembangan varian manfaat *al-qardhul hasan*, yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai modal investasi. Inovasi varian manfaat ini diperlukan khususnya untuk menutupi kekurangan.
- c. Menjadikan pengawasan dalam arti peran aktif bank syariah dalam pelatihan pengembangan kepada para penerima pembiayaan *al-qardhul hasan* sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan produk *al-qardhul hasan*.<sup>130</sup>

Karakteristik akad pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya adalah

;<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Hendri Hermawan A.N, "Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 3 (Desember 2008), h. 265.

<sup>130</sup> Abd. Su'ud, "Perspektif Pengembangan *Al-Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya", (Tesis Program Ekonomi Islam MSI UII, Yogyakarta, 2007), h. 35-36.

<sup>131</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 28 No. 3, (September-Desember 2013), h. 412.

- a. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *muqridh* dalam pembiayaan *qardhul hasan* karena hal tersebut sama dengan *riba*
- b. Pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka barang atau uang telah berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan saat meminjam
- c. *Qardhul hasan* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik
- d. Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya
- e. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad *qardhul hasan* merupakan akad *tabarru'* atau tolong-menolong, kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardhul hasan*. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan *qardhul hasan*. Ketentuan umum *qardhul hasan* dalam bank syariah menurut dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana *Qardhul hasan* adalah pinjaman diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*)

yang memerlukan, dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>132</sup>

Implementasi akad *qardhul hasan* pada BNI Syariah KC Tanjung Karang hanya diterapkan kepada pegawai-pegawai kontrak bank saja dan tidak peruntukkan kepada masyarakat luas. Pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang tidak memberikan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* kepada masyarakat luas dikarenakan terbatasnya dana yang diperoleh dan akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk memberikan dana *qardhul hasan* hanya kepada pegawai-pegawai kontrak bank.

Berdasarkan pembahasan pada jurnal, tesis dan Fatwa DSN MUI diatas, menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan *qardhul hasan* bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman, seperti kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan, biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya.

Pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* seharusnya tidak hanya diterapkan kepada pegawai-pegawai Bank Syariah saja, akan tetapi dapat diberikan juga kepada delapan *ashnaf*. Sehingga peran aktif perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di samping sebagai lembaga

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal dan salah satu peningkatan perekonomian dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan penyaluran dana melalui prinsip *qardhul hasan* yang lebih mengedepankan pemberian pembiayaan kepada delapan *ashnaf* tersebut. Kemudian pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* sangat cocok apabila digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan *qardhul hasan* mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial.

## 2. Analisis Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Program *Islamic Corporate Social Responsibility*

Program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan uang santunan kepada anak yang tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan

kepentingan *stakeholders*-nya, dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar *profitability* perusahaan.

BNI Syariah KC Tanjung Karang secara kontinyu dan terprogram telah menerapkan konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dalam implementasi manajemen usahanya. Secara garis besar, mekanisme pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) di BNI Syariah KC Tanjung Karang melalui beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Perencanaan dan Penganggaran

Beberapa program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) harus melewati tahap perencanaan yaitu seperti bantuan langsung tunai, bantuan hari raya, bantuan pembangunan dan bantuan pendidikan. Pada tahap perencanaan ini manager menentukan berapa orang yang akan menerima dan selanjutnya memperkirakan besarnya anggaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing program. Khusus untuk program kegiatan sosial dan program pembuatan fasilitas umum tidak melalui tahap perencanaan dan penganggaran karena biasanya pihak yang mengajukan telah membuatnya dalam bentuk proposal.

b. Pengajuan Kepada Pimpinan

Program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang sudah melalui tahap perencanaan dan penganggaran ataupun

yang sudah dalam bentuk proposal selanjutnya diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.

c. Penentuan Prioritas

Setelah mendapatkan persetujuan pimpinan untuk melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) maka tahap selanjutnya adalah tahap prioritas. Dimana pada tahap ini manajer dituntut harus mampu memilih program mana yang harus didahulukan. Karena biasanya pimpinan memberikan beberapa pilihan program yang disetujui.

d. Pemetaan di Lapangan

Tahap terakhir adalah pemetaan di Lapangan. Pemetaan di Lapangan yaitu mengimplementasikan program-program yang telah dibuat.

Dari hasil *interview* dengan bapak Dedi Kurniawan selaku *Operational Assistant* di BNI Syariah KC Tanjung Karang, ia menuturkan bahwa dalam pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR), karyawan dilibatkan dalam pemetaan di Lapangan atau pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Namun hanya beberapa program saja karyawan dilibatkan yaitu seperti pembagian daging qurban menjelang hari raya Idul Adha kepada masyarakat disekitar BNI Syariah KC Tanjung Karang, pemberian santunan kepada anak-anak panti asuhan, pembagian bantuan pendidikan seperti buku, alat tulis, perlengkapan sekolah, dan beberapa kegiatan



sosial lainnya.<sup>133</sup> Kemudian untuk kegiatan sosial seperti peringatan HUT RI, jalan sehat, dan acara-acara lain yang melibatkan BNI Syariah KC Tanjung Karang sebagai sponsor biasanya dilakukan sesuai dengan tanggal di dalam pengajuan proposal kegiatan tersebut. Namun untuk kegiatan sosial ini karyawan tidak diizinkan ikut serta dalam kegiatan dikarenakan akan mengganggu pekerjaan.<sup>134</sup>

Pemaparan tentang bentuk *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) di BNI Syariah KC Tanjung Karang disampaikan langsung oleh Ibu Fitria Agussafitri selaku *Back Office Head* (BOH). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat memperoleh informasi sebagai berikut :<sup>135</sup>

#### d. Program Bidang Sosial

BNI Syariah KC Tanjung Karang mendukung kegiatan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dibidang ini secara berkelanjutan, agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan masa depan. Setiap agama mempunyai prinsip dasar yang sama untuk berbagi, menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Seperti : mengadakan kajian rutin satu bulan sekali di kantor BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan mengundang 50 orang dari anak-anak binaan Daarut Tauhid dan

---

<sup>133</sup> Dedi Kurniawan, *Operational Assistant* BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 19 Desember 2017.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Fitria Agussafitri, *Back Office Head* (BOH) BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 12 Januari 2018.

beberapa panti asuhan seperti panti asuhan Al-Banat dan TPA Terapung. Kemudian setiap anak diberi santunan lebih dari Rp. 50.000,- Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan masyarakat.

e. Program Pembangunan

BNI Syariah KC Tanjung Karang melakukan perencanaan, mengimplementasikan, dan mendukung pembangunan sarana umum demi kelangsungan taraf hidup yang lebih baik. BNI Syariah KC Tanjung Karang memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum, seperti membantu Pembangunan Mushola di Pondok Pesantren yatim piatu penghapal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin Jalan Dr. Harun II Komplek vila mas kelurahan Kota baru, pembangunan fasilitas toilet dan bantuan renovasi rumah ustadz di pondok pesantren Al Munawwirussholeh Jalan Moch. Roem Gg. Renville Sumur Putri Teluk Betung Bandar Lampung.

f. Program Pendidikan

BNI Syariah KC Tanjung Karang turut membina dan membantu perkembangan komunitas terutama dalam bidang pendidikan dengan memperhitungkan sensitivitas dan kesesuaian dengan kultur serta kebutuhan masyarakat. Berbagai kegiatan telah dirancang dan diterapkan guna berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara nyata, BNI Syariah KC Tanjung Karang mewujudkan tanggung jawab sosialnya di bidang pendidikan melalui program

bantuan penyediaan berbagai sarana pendukung pendidikan, seperti buku, dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak binaan Daarut Tauhid dan panti asuhan pada saat milad BNI Syariah KC Tanjung Karang.

Berdasarkan implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang telah dilakukan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang peneliti melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada beberapa masyarakat dan lembaga atau pondok pesantren untuk mengetahui respon masyarakat terhadap program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR).

Dari hasil wawancara dengan salah satu pondok pesantren yang merupakan penerima dana bantuan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang yaitu, Bapak M. Iqmal Zain selaku sekretaris di pondok pesantren yatim piatu penghawal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin menuturkan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya dana-dana bantuan seperti itu. Dana tersebut dapat digunakan untuk renovasi bangunan, untuk kegiatan operasional pondok pesantren, dan lain sebagainya. Pondok pesantren sangat membutuhkan dana bantuan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR), karena anak-anak yang tinggal di ponpes tidak dipungut biaya apapun (gratis). Oleh karena itu, semua pengeluaran digunakan untuk anak-anak ponpes. Seperti, biaya sekolah, alat tulis

sekolah, biaya makan, peralatan mandi, dan lain-lain, semua dibayarkan oleh pihak pondok pesantren.<sup>136</sup>

Bapak KH. Syamsir Nasution selaku pimpinan ponpes yatim/ piatu/ dhuafa Anugerah Bandar Lampung juga mengatakan bahwa sangat mendukung dengan terwujudnya program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) kepada beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar Bandar Lampung. Khususnya kepada pondok pesantren yang baru berdiri. Dengan adanya bantuan yang diberikan, pastinya akan bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.<sup>137</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Atin Inayatin yang merupakan salah satu pegawai di lembaga amal zakat Daarut Tauhiid Lampung menyampaikan bahwa dengan adanya program *Islamic corporate social responsibility* dari pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang ini memiliki dampak yang positif untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Dimana pihak Daarut Tauhiid Lampung sebagai fasilitator atau menyambungkan antara pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang dengan pihak-pihak yang membutuhkan seperti anak-anak binaan, panti asuhan dan warga masyarakat yang tidak mampu seperti kaum dhuafa. Beberapa program yang dilakukan yaitu program kajian rutin, program rumah asuh, pendidikan anak TK jadi dana *Islamic corporate social responsibility*

---

<sup>136</sup> M. Iqmal Zain. Sekretaris ponpes yatim piatu penghapal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, tanggal 13 Februari 2018.

<sup>137</sup> KH. Syamsir Nasution. Pimpinan ponpes yatim/piatu/dhuafa Anugerah Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, tanggal 13 Februari 2018.

dari pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang digunakan untuk keperluan menjalankan program-program tersebut.<sup>138</sup>

Respon positif telah disampaikan oleh beberapa masyarakat khususnya oleh pengurus beberapa pondok pesantren dan lembaga amil zakat terhadap program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang telah dilaksanakan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang. Namun disisi lain pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang diharapkan dapat memperhatikan pemberdayaan masyarakat seperti memberikan pendidikan atau pelatihan wirausaha bagi ibu-ibu rumah tangga di sekitar BNI Syariah KC Tanjung Karang dan bagi anak-anak di pondok pesantren tersebut agar mereka memiliki penghasilan tambahan dan menjadi mandiri.

Seperti yang telah disampaikan oleh para penerima program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang bahwa mayoritas mengatakan hal positif terhadap program-program tersebut. Berdasarkan respon tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya apabila suatu lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah melakukan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dengan baik dari awal dan akhir maka keuntungannya bisa didapatkan oleh lembaga keuangan yaitu mengurangi reaksi negative pada suatu lembaga keuangan tersebut dan masyarakat sekitar juga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

---

<sup>138</sup> Atin Inayatin. Bendahara Lembaga Amil DT Peduli Lampung, wawancara dengan penulis, 28 Februari 2018.

## **B. Dampak Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Sosial**

### **1. Dampak Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Kesejahteraan Sosial**

Dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* dirasakan oleh para anggota pembiayaan antara lain dibidang modal usaha, kesehatan, pendidikan dan pembangunan. Ekonomi merupakan faktor penting dalam masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat bisa dinilai dari faktor ekonominya. Untuk menumbuhkan ekonomi yang baik masyarakat bisa berwirausaha. Modal bukan merupakan kendala karena BNI Syariah KC Tanjung Karang bisa memberikan solusi kepada masyarakat yang menginginkan tambahan modal untuk usahanya. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan BNI Syariah KC Tanjung Karang telah mengembangkan usaha nasabah. Dengan hasil usaha yang baik, kesejahteraan nasabah juga meningkat. Di sini BNI Syariah KC Tanjung Karang berhasil memberikan pinjaman yang baik kepada nasabah.

Selanjutnya yaitu dampak pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk pendidikan. Salah satu dari karyawan BNI Syariah KC Tanjung Karang juga melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Tujuannya juga untuk membayar biaya pendidikan atau untuk biaya sekolah anak. Berdasarkan hasil wawancara serta kuesioner yang dilakukan oleh peneliti, menurut bapak Jauhari selaku satpam di BNI Syariah KC Tanjung Karang, menuturkan bahwa ia mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* sebenarnya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk anaknya.



Pembiayaan itu digunakan anaknya untuk melanjutkan pendidikan S1 di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Meskipun sebagai pegawai, bapak Jauhari tetap mengikuti prosedur pembiayaan yang ada di BNI Syariah KC Tanjung Karang dan juga menyerahkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan pembiayaan.<sup>139</sup>

Selain di bidang pendidikan, BNI Syariah KC Tanjung Karang juga memperhatikan faktor kesehatan masyarakat. Kepedulian BNI Syariah KC Tanjung Karang terhadap kesehatan dilakukan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Seperti yang disampaikan oleh kak Malik Abdul Aziz selaku *driver* di BNI Syariah KC Tanjung Karang yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk mendapatkan biaya berobat ibunya. Waktu itu beliau sakit tipes, lalu dibawa ke Puskesmas dan disuruh rawat inap disitu. Berhubung dadakan dan juga tidak ada persiapan dana waktu itu. Sebagai anak saya juga berusaha mencari dana. Saya ke BNI Syariah KC Tanjung Karang mengajukan pembiayaan untuk orang sakit. Saya lengkapi semua persyaratannya, kemudian pengajuan saya diterima. Alhamdulillah pencairannya juga cepat, sehari bisa dicairkan sehingga pada keesokan harinya saya bisa membawa ibu saya ke rumah sakit.

Dampak dalam pemberian pinjaman melalui akad *qardhul hasan* kepada karyawan bank saja memang dapat dinilai mampu mengurangi risiko dalam pengembalian dana atau pinjaman tidak kembali. Akan tetapi, jika pihak bank syariah ingin memberikan pinjaman kepada

---

<sup>139</sup> Jauhari, Satpam BNI Syariah KC Tanjung Karang, wawancara dengan penulis, tanggal 15 Februari 2017.

masyarakat luas harus mengetahui seluk beluk nasabahnya terlebih dahulu, sehingga akan mengetahui karakter nasabah yang ingin meminjam. Seperti halnya melihat aspek-aspek dalam prosedur penilaian permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, seperti : *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *constraint* (hambatan).

Terkait dengan aspek-aspek dalam prosedur penilaian permohonan pembiayaan *qardhul hasan*, jika dapat di implementasikan dengan baik maka pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang dapat memberikan pinjaman pembiayaan *qardhul hasan* tidak hanya kepada karyawan bank saja melainkan dapat diberikan juga kepada masyarakat luas. Karena dalam pemberian pinjaman melalui akad *qardhul hasan* adalah dapat membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, selanjutnya apabila untuk menambah modal usaha, dana *qardhul hasan* akan semakin meningkatkan keuntungan usaha dan mampu meningkatkan omzet penjualan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

## 2. Dampak Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Sosial

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong

seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance*, *good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan *shareholder* (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*.<sup>140</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perseroan atau penanaman modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis.

Melindungi perusahaan dari berbagai risiko tuntutan hukum, kehilangan *partner* bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (*brand risk*) tidak cukup hanya taat kepada peraturan perundang-undangan. Tekanan secara nasional dan internasional sedang dan terus

---

<sup>140</sup> Andi Mapisangka, "Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat". *Jurnal JESP*, Vol 1 No. 1 (2009), h. 39.

akan berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis korporasi. Tekanan ini datang antara lain dari para pemegang saham, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), *partner* bisnis (terutama dari negara yang komunitas bisnisnya peka terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam hal ini program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara implementatif, perkembangan program *Islamic Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang telah banyak memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Program yang dilakukan, seperti membantu masyarakat yang berada di pondok pesantren, di panti asuhan dan masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren dan panti asuhan. Selanjutnya, membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan menjadi salah satu tujuan BNI Syariah KC Tanjung Karang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bapak M. Iqmal Zain selaku sekretaris di pondok pesantren yatim piatu penghapal Al-Qur'an Riyadhus Sholihin Bandar Lampung menuturkan bahwa merasa terbantu dengan adanya dana-dana bantuan yang diberikan oleh BNI Syariah KC Tanjung Karang. Dana tersebut

dapat digunakan untuk renovasi bangunan, untuk kegiatan operasional pondok pesantren, dan lain sebagainya. Dimana pengeluaran pondok pesantren sangat banyak dibandingkan dengan jumlah pemasukan yang bisa dikatakan kekurangan. Dengan bantuan yang diberikan oleh pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang tentu sangat membantu tambahan pendapatan operasional pondok pesantren. Bantuan yang diberikan yaitu untuk renovasi bangunan, untuk kegiatan operasional pondok pesantren, dan lain sebagainya. Apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang Timur karena sudah memperhatikan pondok pesantren yang ada di sekitar wilayah Bandar Lampung.<sup>141</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Atin Inayatin yang merupakan salah satu pegawai di lembaga amil zakat Daarut Tauhiid Lampung menyampaikan bahwa dengan adanya program *Islamic corporate social responsibility* dari pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang ini memiliki dampak yang positif untuk semua masyarakat yang membutuhkan, seperti anak-anak binaan, panti asuhan dan warga masyarakat yang tidak mampu seperti kaum dhuafa.<sup>142</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh para penerima program *Islamic Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang bahwa mayoritas mengatakan hal positif terhadap program-program tersebut.

---

<sup>141</sup> M. Iqmal Zain. Sekretaris ponpes yatim piatu penghapal Al-Qur'an Riyadhush Sholihin Bandar Lampung, wawancara dengan penulis, tanggal 13 Februari 2018.

<sup>142</sup> Atin Inayatin. Bendahara Lembaga Amil DT Peduli Lampung, wawancara dengan penulis, 28 Februari 2018.

Sebagaimana yang dikatakan Edi Suharto, “Sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan”.<sup>143</sup> Secara tidak langsung pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendasar melalui program-program *Islamic Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan pada pendistribusian dana program *Islamic Corporate Social Responsibility* seperti memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan dan masyarakat luas maka dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

Program *Islamic Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adiwarmankarim dimana dimana lembaga keuangan yang menjalankan program *Corporate Social Responsibility* berdasarkan nilai-nilai Islam seharusnya memenuhi enam kriteria yaitu kepatuhan syariah, keadilan, bertanggungjawab, kesehatan, kelestarian alam dan bantuan kebajikan atau sosial. Sedangkan program *Islamic Corporate Social Responsibility* yang diterapkan oleh pihak BNI Syariah KC Tanjung Karang belum sepenuhnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lemah dan menjaga kelestarian lingkungan.

---

<sup>143</sup> Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.



**C. Solusi dalam Implementasi Akad *Qardhul Hasan* dan Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Sosial**

**1. Solusi dalam Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Kesejahteraan Sosial**

Solusi dalam implementasi akad *Qardhul Hasan* terhadap kesejahteraan sosial adalah bank-bank syariah seharusnya dalam memberikan pembiayaan lebih difokuskan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan pembiayaan ke UMKM, bank syariah telah berjuang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi umat.

Dalam hal ini BNI Syariah KC Tanjung Karang hanya memberikan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* kepada pegawai kontrak atau pegawai *outsourcing* BNI Syariah KC Tanjung Karang dan bukan diberikan kepada masyarakat umum atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seharusnya dalam memberikan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* lebih difokuskan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan memberikan pembiayaan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka bank syariah telah berjuang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi umat dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Apabila BNI Syariah KC Tanjung Karang memiliki produk pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* yang diperuntukan bagi nasabah mikronya. Dengan produk ini nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah.

Nilai plus yang diberikan dari produk tersebut adalah karena persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, pengembalian dana sesuai dengan pinjaman tanpa adanya tambahan atau imbalan apapun, dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh temponya. Dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah merasakan dampak positifnya juga nasabah bisa tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal, sehingga kesejahteraan umat seperti yang diharapkan dapat terwujud.

## 2. Solusi dalam Implementasi Program *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Sosial

Solusi dalam implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kesejahteraan sosial yaitu dalam penyaluran dana program *Islamic corporate social responsibility*, hendaknya mengembangkan program jangka panjang dan adanya pengarahan, pembinaan dan pengawasan kepada para penerima dana seperti panti asuhan, pondok pesantren dan masyarakat sekitar sehingga nantinya mampu menjadi mandiri dan sejahtera dalam perekonomiannya.

Berdasarkan implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dijalankan BNI Syariah KC Tanjung Karang mencakup tiga aspek yaitu program bidang ibadah atau keagamaan, bidang pembangunan, sosial dan bidang pendidikan. Munculnya program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dijalankan BNI

Syariah KC Tanjung ini dilatar belakangi oleh adanya amanat Undang-Undang, kesadaran dan kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaannya, program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) banyak berfokus pada pengembangan kemandirian masyarakat yang ada di pondok pesantren dimana kemandirian yang dimaksudkan adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diupayakan oleh diri sendiri yaitu dengan cara mengimplementasikan program bantuan dana untuk pembangunan pondok pesantren.

Perusahaan sejatinya tidak mengklasifikasikan program ke dalam kriteria prioritas dan non-prioritas, namun dalam perjalanannya terdapat program yang mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat serta memberikan pengaruh besar terhadap kondisi masyarakat sehingga perusahaan menempatkannya sebagai program unggulan. Secara umum diketahui bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dalam penyusunan program, hal ini dapat terlihat dari upaya perusahaan dalam menentukan arah program yang memprioritaskan pembangunan berkelanjutan yang disertai dengan langkah preventif guna mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dijalankan BNI Syariah KC Tanjung muncul baik dari masyarakat maupun perusahaan sendiri.

Hambatan dari masyarakat antara lain tingginya ekspektasi masyarakat terhadap program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) dimana masyarakat menuntut pencapaian lebih terhadap program tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam merealisasikannya serta kurangnya pemanfaatan dari masyarakat dimana program tidak diupayakan pengembangannya sehingga program tidak efektif dan lebih mudah terhenti. Sedangkan hambatan yang muncul dari perusahaan akibat inkonsistensi dalam pelaksanaan program dimana perusahaan kerap menjalankan program-program secara tidak berkesinambungan. Hambatan yang kedua adalah sulitnya menentukan program yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Terakhir adalah birokrasi yang lama dimana mulai dari pengajuan bantuan hingga tahap realisasi membutuhkan proses panjang. Adapun solusi pemecahan yang dilakukan BNI Syariah KC Tanjung Karang adalah bekerjasama dengan tokoh masyarakat (*local hero*), evaluasi berkala, serta menentukan program prioritas.

BNI Syariah KC Tanjung Karang diharapkan tetap dapat mempertahankan program *Islamic corporate social responsibility* yang telah dilaksanakan. Senantiasa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BNI Syariah KC Tanjung Karang, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan produk *Qardhul Hasan* didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada BNI Syariah KC Tanjung Karang pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan* diimplementasikan kepada pegawai kontrak BNI Syariah KC Tanjung Karang yang membutuhkan dana yang digunakan bersumber dari dana yang diterima dari zakat, infaq, sedekah dan hasil pendapatan non halal bank.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) untuk menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya. Pada BNI Syariah KC Tanjung Karang

telah menyisihkan 2,5% (dua koma lima persen) untuk mengimplementasikan program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dalam penelitian tentang implementasi akad *Qardhul Hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah KC Tanjung Karang, maka peneliti ingin memberi saran sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* seharusnya tidak hanya diberikan kepada karyawan kontrak pada BNI Syariah KC Tanjung Karang saja, melainkan lebih diberikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Kemudian dalam sumber dana penyalurannya, perlu diperlakukan pengarahannya, pembinaan dan pengawasan agar dana yang halal dan haram tidak bercampur.
2. Dalam implementasi program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) BNI Syariah KC Tanjung Karang diharapkan dapat mempertahankan program-programnya yang telah dilaksanakan dan dilakukan secara terus-menerus serta dapat mengembangkan program jangka panjang yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi bisa menjadi produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

3. Abd. Su'ud, "Perspektif Pengembangan *Al-Qardhul Hasan* Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitifnya", Tesis Program Ekonomi Islam MSI UII, Yogyakarta, 2007.
4. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Cet III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
5. Adiwarman Azwar Karim, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.
6. Agus Triyanta, "Optimalisasi Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia". Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jakarta, 2013.
7. Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2010.
8. Ainun Fatimah Anam, "*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam". Skripsi Program S1 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2016.
9. Alma Deleni, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) UMKM Batik Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta, 2017.
10. Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
11. Andi Mapisangka, "Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat". *Jurnal JESP*, Vol 1 No. 1 2009.
12. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2009.
13. \_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
14. Ani Yuningsih, *Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Publisitas, Citra, Dan Etika, dalam Profesi Public Relation*, (terakreditasi Dirjen Dikti SK No. 56/DIKTI/Kep/2005), Vol. 6 No.2 Desember 2005.
15. Arsip Dokumen BNI Syariah KC Tanjung Karang, 2017.
16. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- 17.
18. BNI Syariah, "PT BNI Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah". ( On-Line ), tersedia di : <http://www.co.id/BeritaBNI/SiaranPers/tabid/246/articleTyp/ArticleVeew/articleId/325/PT-Bank-BNI-Syariah-resmi-menjadi-Bank-Umum-Syariah.aspx>. (19 Januari 2018).
19. Darmawati, "*Corporate Sosial Responsibility* dalam Perspektif Islam". *Jurnal MAZAHIB*, Vol. XIII No. 2 Desember 2014.



20. Dedi Riswandi, "Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2 Desember 2015.
21. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
22. Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
23. Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qardh* Sebagai Akad *Tabarru*". *Jurnal Yuridika*, Vol 28 No. 3 September-Desember 2013.
24. Hafiez Sofyan, dkk, "*Islamic Social Reporting Index* sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)" *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 4, No. 1 Maret 2012.
25. Hendri Hermawan A.N, "Sumber dan Penggunaan Dana *Qard* dan *Qardhul Hasan* pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 3 Desember 2008.
26. Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
27. Heru Sulisty, Abdul Hakim, "Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Melalui *Qardhul Hasan*". *Jurnal Riptek*, Vol. 7 No. 1 2013.
28. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
29. H. Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim, "Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah". *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 15, No. 2 Juli-Desember, 2016.
30. Imam Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pers, 2016 mengutip Wahbah al-Zuhaili. *Al-Zuhaili, al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al Fikr, 2004.
31. Irfham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
32. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
33. Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2011.
34. Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J, "Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan *Islamic Social Reporting Indeks*", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol 5, No. 1, Maret 2013.
35. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
36. Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
37. Muhammad Imam Purwadi, "*Al-Qardh* dan *Al-Qardhul Hasan* sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum IUS QUI IUSTUM*, Vol. 21 No. 1 Januari 2014.

38. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani Press, 2001.
39. Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
40. \_\_\_\_\_. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
41. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
42. Nur Kholis, Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015.
43. Nurdin Umar, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002, dikutip oleh Maya Pranita. "Analisis Pengaruh Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN VII Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi Program Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2016.
44. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
45. Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: AMZAH, 2016.
46. Sayd Farook, "On Corporate Social Responsibility Of Islamic Financial Institutions". *Jurnal Islamic Economic Studies*, Vol. 15 No. 1 July 2007.
47. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
48. \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
49. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
50. Syaamil Quran, *Hijaz The Practice 604 Panduan Amal Praktis Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan As Sunnah*, Bandung: Syaamil Quran, 2013.
51. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Haq, 2014.
52. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (3).
53. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).
54. \_\_\_\_\_. Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Pasal 1 ayat (1).
55. \_\_\_\_\_. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (1).
56. Wahyuddin, "Islamic Corporate Social Responsibility; Kajian Teoritis", *Jurnal Akad*, Vol. 1 2016.

57. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014.
58. Ziauddin Sardar, “Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No. 5 Mei 2016.